

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 01556/UN7.F7/PP/XI/2024

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah up. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 9, Mugassari, Semarang
Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 - 6 Desember 2024.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama	: ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa	: 14010123410004
Judul	: Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Jawa Tengah
Alamat Rumah	: Jatimalang RT 01 RW 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah
Alamat Email	: rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor Telepon	: 0895390677826

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 15 November 2024

Dekan

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 03417/UN7.F7/PP/X/2024
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah up. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Kec. Semarang
Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 - 6 Desember 2024.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama	: ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa	: 14010123410004
Judul	: Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Jawa Tengah
Alamat Rumah	: Jatimalang RT 01 RW 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah
Alamat Email	: rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor Telepon	: 0895390677826

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 30 Oktober 2024

Dekan

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 03425/UN7.F7/PP/X/2024

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Tibayan, Kecamatan Jatinom, Klaten

Jl. Tibayan Km 0,5 Tibayan, Jatinom, Klaten

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010123410004
Judul : Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah
Alamat Rumah : Jatimalang RT 01 RW 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah
Alamat Email : rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor Telepon : 0895390677826

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 30 Oktober 2024

Dekan

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 03424/UN7.F7/PP/X/2024

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Kedungwaduk, Kecamatan Karangmalang, Sragen
Kedungwaduk, Kecamatan Karangmalang,
Sragen

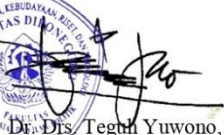
Dalam rangka mempersiapkan penulisan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010123410004
Judul : Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah
Alamat Rumah : Jatimalang RT 01 RW 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah
Alamat Email : rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor Telepon : 0895390677826

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 30 Oktober 2024

Dekan

Dekan
NIP. 196908221994031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 03423/UN7.F7/PP/X/2024

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Demak
Jalan Onggorawe - Mranggen Km. 4 Prampelan,
Kecamatan Sayung, Demak

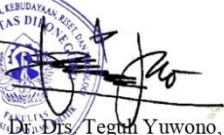
Dalam rangka mempersiapkan penulisan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010123410004
Judul : Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu
Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah
Alamat Rumah : Jatimalang RT 01 RW 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa
Tengah
Alamat Email : rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor Telepon : 0895390677826

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 30 Oktober 2024

Dekan

Dekan
NIP. 196908221994031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 03422/UN7.F7/PP/X/2024

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Krajanbogo, Kecamatan Bonang, Demak
Jalan Desa Krajanbogo RT.02 RW.04, Bonang,
Demak

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010123410004
Judul : Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah
Alamat Rumah : Jatimalang RT 01 RW 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah
Alamat Email : rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor Telepon : 0895390677826

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 30 Oktober 2024

Dekan

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 03421/UN7.F7/PP/X/2024

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Demak
Jalan Semarang Demak Km 11, Sayung, Demak

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010123410004
Judul : Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah
Alamat Rumah : Jatimalang RT 01 RW 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah
Alamat Email : rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor Telepon : 0895390677826

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 30 Oktober 2024

Dekan

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 03420/UN7.F7/PP/X/2024

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Jl. Ki Mangunsarkoro No 12, Semarang

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010123410004
Judul : Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah
Alamat Rumah : Jatimalang RT 01 RW 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah
Alamat Email : rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor Telepon : 0895390677826

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 30 Oktober 2024

Dekan

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 03416/UN7.F7/PP/X/2024

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
Jl. Madukoro AA-BB No.44 Semarang

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010123410004
Judul : Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah
Alamat Rumah : Jatimalang RT 01 RW 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah
Alamat Email : rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor Telepon : 0895390677826

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 30 Oktober 2024

Dekan

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 03415/UN7.F7/PP/X/2024

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda No.127-133, Kota Semarang, Jawa
Tengah

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Badan

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010123410004
Judul : Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah
Alamat Rumah : Jatimalang RT 01 RW 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah
Alamat Email : rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor Telepon : 0895390677826

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 30 Oktober 2024


Dekan
Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 00801/UN7.F7/PP/XI/2024

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah up. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 9, Mugassari, Semarang
Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 - 6 Desember 2024.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010123410004
Judul : Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah
Alamat Rumah : Jatimalang RT 01 RW 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah
Alamat Email : rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor Telepon : 0895390677826

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 08 November 2024

Dekan

Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Pemuda Nomor 127 – 133 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515591, 3515592, 3584924-29
Faksimile (024) 3546802, 3516224 Laman <http://bappeda.jatengprov.go.id>
Surel Elektronik bappeda@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 174 / Hf. PSb / XI / 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro :

Nama : Ardaffa Firezha Wirandika
NIM : 14010123410004
Alamat Rumah : Jatimalang RT 01/RW 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo,
Jawa Tengah
Alamat Email : rezha.ardaffa@gmail.com
Nomor Telepon : 0895 39067 7826

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data pada tanggal 11 November 2024 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk penulisan Tesis dengan judul **Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah** dengan melakukan wawancara kepada Perencana Ahli Madya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perencana Ahli Madya

Nurwi Mayasri Fitri Astuti, S.Sos, M.Si
NIP. 19721105 199803 2 008



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA**

Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 12, Semarang, Kode Pos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958;
Faksimile (024) 8419959 Laman <http://www.jatengprov.go.id>;
Posel disporapar@jatengprov.go.id

Nomor : 000.9/4942
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Semarang, 26 November 2024
Kepada

Yth. Dekan FISIP UNDIP

di -
Semarang

Menunjuk surat Saudara Nomor 03420/UN7.F7/PP/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami menerima Mahasiswa S2 UNDIP yaitu :

Nama : Ardaffa Firezha Wirandika
NIM : 14010123410004
Judul Tesis : Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Jawa Tengah

Untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara di **Bidang Destinasi Pengembangan Pariwisata** Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk dapat menaati Tata Tertib sebagai berikut:

1. Dalam hal pengumpulan data primer, kesediaan untuk memberikan data/informasi merupakan hak responden;
2. Selama dilingkungan kerja, Peserta harus disiplin dan berlaku sopan santun. Memakai pakaian yang sesuai dengan lingkungan kerja, secara umum agar diperhatikan : berpakaian sopan, tidak memakai sandal, tidak memakai jeans dan tidak memakai kaos (*T-shirt*);
3. Tidak diperkenankan untuk mengambil tanpa ijin data-data pribadi dan/atau data milik Instansi;
4. Selalu menjaga etika birokrasi yang berlaku.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris



Disandatangani secara
elektronik oleh:

SYURYA DETA SYAFRIE, ST, MT
Pembina
NIP 19810606 200501 1 007



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Madukoro AA – BB Nomor 44 Kota Semarang Kode Pos 50144 Telp. 024- 7608203
Faksimile 7608379 laman <http://esdm.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik esdm@jatengprov.go.id

Semarang, 19 Desember 2024

Nomor : 400.14.5.4/ 9811
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
di –

SEMARANG

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Nomor 03416/UN7.F7/PP/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Ardaffa Firezha Wirandika	14010123410004	Magister Ilmu Politik

Telah selesai melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara untuk penulisan Tesis dengan judul **"Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah"**.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris



ENDRO HUDAYONO, A.P., S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760519 199412 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Mahasiswa/i yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAAGA, DAN
PARIWISATA**

Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 12, Semarang, Kode Pos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958;
Faksimile (024) 8419959 Laman <http://www.jatengprov.go.id>;
Posel disporapar@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR 000.9/5346

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : SYURYA DETA SYAFRIE, ST, MT
b. Jabatan : SEKRETARIS

dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : Ardaffa Firezha Wirandika
b. NIM : 14010123410004
c. Program Studi : Magister Ilmu Politik
d. Universitas : Universitas Diponegoro
e. Maksud : Telah selesai melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 19 Desember 2024

a.n. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan
Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah,
Sekretaris



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SYURYA DETA SYAFRIE, ST, MT
Pembina
NIP. 19810606 200501 1 007



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243
Telp. 024-8311173 (20 saluran) Faks. 024-8311266
Website: <http://www.jatengprov.go.id> Email : setda@jatengprov.go.id

Semarang, 6 Desember 2024

Nomor : 400.14.5.4/569
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Di Tempat

Menunjuk surat Saudara Nomor 03417/UN7.F7/PP/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 hal permohonan Izin Penelitian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan atas permohonan Penelitian Mahasiswa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, atas nama Ardaffa Firezha Wirandika.
2. Mahasiswa tersebut akan melaksanakan penelitian pada unit kerja sebagaimana berikut:

Tempat Penelitian	Tanggal Pelaksanaan
Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama	11 November s.d 31 Desember 2024
Biro Kesejahteraan Rakyat	18 November s.d 06 Desember 2024
Biro Hukum	18 November s.d 06 Desember 2024

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Semarang,
Pada tanggal: 6 Desember 2024

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Administrasi
u.b.
Kepala Biro Organisasi



Dadang Somantri ,ATD, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19650622 198703 1 007

TEMBUSAN :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
DESA SIDOGEMAH

Alamat : Jl.Raya Semarang - Demak Km 11 (Kode Pos 59563)

Nomor Kode Desa : 33.21.04.2014

SURAT KETERANGAN

Nomor: 045.2/ 11 / XI /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menerangkan bahwa:

Nama	:	ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomir Induk Mahasiswa	:	14010123410004
Alamat rumah	:	Jatimalang Rt 01 Rw 02 Joho, Mojolaban Sukoharjo Jawa Tengah
Alamat email	:	rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor telepon	:	0895390677826

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data pada tanggal 12 Nopember 2024 di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk penulisan Tesis dengan judul **Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah** dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Sidogemah.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidogemah, 12 Nopember 2024

KEPALA DESA SIDOGEMAH





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
DESA PRAMPELAN**

Sekretariat : Jl. Onggorawe – Mranggen Km. 4 Pos. 59563 Hp. 081225331968
Website : [http:// www.pemdesprampelan.blogspot.com](http://www.pemdesprampelan.blogspot.com) _ Email : pemdesprampelan@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 470/ 30 / XI /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Prampelan, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, menerangkan bahwa:

Nama : ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Jenis Kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : Pelajar
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Alamat : Jati Malang RT 01 RW 02 Joho,Mojolaban,Sukoharjo Jateng

Telah Melakukan Penelitian Kinerja Birokrasi Dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jateng Di Desa Prampelan Kec Sayung Kab Demak

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Prampelan, 12-11- 2024
Mengetahui
Kepala Desa Prampelan

MUHAMMAD QOIF



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA KRAJANBOGO**

Sekretariat : Jl. Utama Desa Krajanbogo kec. Bonang Kode Pos : 59552

Nomer Kode Desa : 3321122002

SURAT KETERANGAN

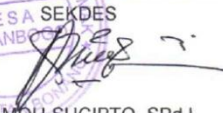
Nomer ; 045.2 / 320 / XI / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menerangkan Bahwa :

Nama : ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomer Induk Mahasiswa : 1401012310004
Alamat rumah : Jati Malang Rt 01 Rw 02 Joho, Mojolaban
Sukoharjo Jawa Tengah
Alamat email : rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomer Telpn : 0895390677826

Benar- benar Telah melaksanakan penelitian dan mengumpulkan Data pada Tanggal 12 Nopember 2024 Di Desa Krajanbogo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk penulisan Tesis dengan Judul **Kinerja Birokrasi dalam implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Iawa Tengah** dengan melakukan Wawancara Kepada Kepala Desa Krajanbogo

Demikian Surat ini di buat atas permintaan yang bersangkutan untuk dapat **di pergunakan sebagaimana mestinya**.

Krajanbogo, 12 Nopember 2024
a/n KEPALA DESA KRAJANBOGO
DESA SEKDES
KRAJANBOGO

H. MOH SUCIPTO, SPd.I



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JATINOM
DESA TIBAYAN

Alamat : Jl. Tibayan Km. 0,5, Tibayan, Jatinom, Kode Pos 57481

No. Kode Desa
33.10.20.2007

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/319/XI/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Tibayan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro :

Nama : ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010123410004
Alamat Rumah : Jatimalang Rt 01/ Rw 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah
Alamat Email : rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor Telepon : 0895 39067 7826

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data pada tanggal 5 November 2024 di Desa Tibayan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten untuk penulisan Tesis dengan judul **Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah** dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Tibayan.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tibayan, 05 November 2024





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN KARANGMALANG
DESA KEDUNGWADUK

Alamat: Jln Gambiran – Pengkok Km:07 Kedungwaduk, Kode Pos:57222

Kedungwaduk, 05 November 2024

Nomor : 474/ 201/ XI /2024
Perihal : Penerimaan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Di_
Tempat

Dengan hormat

Menindaklanjuti surat dari Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor Surat : 03424/UN7.F7/PP/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 perihal permohonan izin penelitian dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa . Maka kami memberi izin penelitian kepada :

Nama : ARDAFFA FIREZHA WIRANDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010123410004
Judul : Kinerja Birokrasi dalam Implementasi Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah
Alamat Rumah : Jatimalang RT 01 RW 02 Joho, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah
Alamat Email : rezha.ardaffa99@gmail.com
Nomor Telepon : 0895390677826

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Kepala Desa Kedungwaduk

Priyadi, S.Pd.,M.Pd.

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) PROVINSI JAWA TENGAH

Hari, Tanggal : Senin, 11 November 2024
Pewawancara : Ardaffa Firezha Wirandika
Informan : Nurwi Mayasari F
Jabatan Informan : Fungsional Perencana Madya / Sekretariat TKPK
Alamat : Jl. Pemuda No. 127 - 133 Semarang
Nomor HP : 0811290575
Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara
S = Sumber / Informan

P : Bagaimana tujuan utama dari Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah?

S : Intinya tiap OPD ada kontribusi untuk penanggulangan kemiskinan. Waktu itu Pak Ganjar pengen ada gerakan masif untuk upaya menurunkan kemiskinan. Walaupun sebenarnya untuk penurunan kemiskinan itu tidak semata-mata dari kita intervensi trus besok bisa merubah segalanya. Apalagi kalau itu bentuknya intervensi pemberdayaan, tidak akan 1-2 tahun selesai. Waktu itu kita dasarnya Perpres No 15 tahun 2010 tentang 4 strategi. Ketika sudah diintervensi dan sudah ada perbaikan dari indikator-indikator pelayanan dasar, seharusnya ada perbaikan data dari desa. Nah ini sebenarnya yang kita butuhkan. Kalau sudah punya layanan dasar, sudah terintervensi, tinggal memberdayakan dia agar bisa menghidupi keluarga. Jadi inginnya bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan dengan apa yang bisa dilakukan OPD.

P : Apa yang menjadi latar belakang peluncuran program ini dan bagaimana program ini direncanakan untuk menjangkau desa-desa miskin ekstrem?

S : Program ini sebenarnya adalah pelaksanaan dari RPJMD 2018/2019. Karena disitu ada mandat, isinya bekerja bersama untuk penanggulangan kemiskinan. Nah diwujudkan 1 OPD punya 1 desa dampungan. Semangatnya waktu itu karena persentase kemiskinan Jawa Tengah masih 2 digit, di atas nasional. Sebenarnya harapannya ini berlanjut sampai selesai periode Pak Ganjar di 2024 ini, tapi kemungkinan kami akan meneruskan model ini. Ini ditujukan untuk perbaikan tata kelola penanggulangan kemiskinan, khususnya terkait pengelolaan data. Karena ketika kita akan intervensi tapi datanya tidak benar, itu sia-sia. Itu masih belum ada yang bisa menyelesaikan data yang tidak tepat sasaran. Nah ini kewenangan kita sangat terbatas. Di bawah itu masih sangat semrawut. Satu NIK bisa banyak nama, satu nama bisa banyak alamat. Itu ternyata kewenangan baik kabupaten/kota atau provinsi itu ditutup oleh

pusat. Padahal kewenangan itu sebenarnya ada di kabupaten/kota, tapi tidak diberikan akses oleh pusat. Gerakan kita sudah masif tapi ketika kita terbentur, melakukan diskresi itu susah. Kita mau melangkah seperti ini, tapi diputus oleh pusat. Kita di Jawa Tengah menerima data P3KE dari pusat, itu yang tidak padan NIK banyak. Tapi itu tidak ada solusi bagaimana kami harus menyelesaikan itu. Kami sudah berkirim surat dengan Dirjen Adminduk tidak ada respon. Kami ingin padankan data dengan Kemensos, tidak ada respon. Padahal untuk gerakan I OPD 1 Desa Dampingan ini basis datanya juga dari situ. Jadi akhirnya karena ditutup di sana sini, kita menginovasi sendiri, punya cara sendiri, jadi DTKS yang lama yang kita punya, Februari 2022 itu ditracking, disesuaikan dengan kondisi di kabupaten/kota. Kita memverval sendiri, sampai ada salah satu kabupaten yang memadankan NIK dengan menempuh cara manual.

P : Apa peran TKPK dalam merancang dan mengawasi pelaksanaan program ini hingga di level desa dampingan?

S : Setelah kita dipanggil Pak Wagub waktu itu, kemudian kita berdiskusi, kami membentuk tim, tetapi leading tetap di kami, di Bappeda selaku TKPK untuk membuat skenarionya. Tetapi ketika sudah di pelaksanaan semua ada di Biro Kesra. Mulai dari desain, sampai adanya buku pedoman, sampai memilih lokasi itu dari kami. Karena memang kami selaku Sekretariat TKPK tugas kami mengoordinasikan.

P : Bagaimana TKPK memastikan bahwa setiap OPD memahami dan menjalankan program ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?

S : Kami secara periodik melakukan monev triwulan. Tapi kalau di Biro Kesra mereka juga melakukan evaluasi di bawah Asisten Kesra. Jadi OPD menyampaikan satu-satu. Kalau kami laporan periodik triwulan itu harus ada surat Gubernur, itu

P : Menurut TKPK, sejauh mana kesesuaian antara program ini dengan tupoksi masing-masing OPD berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi di lapangan?

S : Nah kita kan ada 48 OPD, sebenarnya tidak semua terlibat secara langsung dalam penanggulangan kemiskinan. Contoh seperti BKD, Biro, RS, itu kan secara tupoksi bukan ke penanggulangan kemiskinan. Tetapi mereka tetap melakukan itu, dalam bentuk memberi masukan kepada OPD yang terlibat langsung. Kemudian juga OPD itu akan mengontak ke CSR. Jadi peran OPD yang terlibat ini punya channeling ke CSR maupun Baznas. Walaupun tidak langsung, tiap OPD diberikan kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu untuk menurunkan angka kemiskinan. Kalau OPD yang secara langsung ya sesuai tupoksi mereka.

Kami sebenarnya punya dokumen yang khusus untuk penanggulangan kemiskinan yang jangka waktunya 5 tahunan. Dulu namanya SPKD 2019-2023, sekarang menjadi RPKD 2024-2026 sekarang menjadi 3 tahunan. Ini yang terkait dengan OPD yang langsung berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, ada 18 OPD. Tapi kalau yang gerakan 1 OPD 1 Desa Dampingan ini memang karena di RPJMD, kepala daerah memang

meminta semua OPD menempuh caranya masing-masing. Jadi intinya ini melaksanakan apa yang ada di dokumen RPJMD sekaligus arahan dari kepala daerah, karena kondisinya ingin cepat menurunkan kemiskinan.

P : Apakah ada upaya dari TKPK untuk memastikan bahwa program ini selaras dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap OPD?

S : Ya kalau ini memang tidak bisa diselaraskan. Karena semua harus terlibat, harus mau untuk membantu dengan melakukan asesmen dan sinergi. Jadi memang tidak terkait dengan tupoksi.

P : Apa dampak yang diharapkan dari program ini terhadap masyarakat di desa miskin ekstrem di Jawa Tengah?

S : Kalau dari kami mengharapkan itu ada perubahan posisi. Dari yang awalnya terendah bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Kemudian juga sekali lagi, kami sangat mengharapkan itu di perbaikan data. Karena masih sangat banyak warga yang seharusnya masuk ke data tapi justru masih di luar, dan ada juga yang seharusnya sudah keluar tapi masih ada di dalam data.

P : Apakah ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas program di desa-desa dampingan?

S : Kalau untuk pemantauan itu ada di Biro Kesra, tapi memang belum sampai ke substansi programnya. Jadi hanya melihat apakah sudah ada kegiatan, sudah ada kontribusi dari OPD apa tidak.

P : Sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuannya di desa miskin ekstrem?

S : Gerakan ini kita anggap berhasil kalau kemiskinan di Jawa Tengah bisa turun signifikan sampai bisa 1 digit. Tetapi rilis angka kemiskinan itu oleh BPS. Sementara BPS melakukan dengan metode survei secara acak, sampling terbatas. Ketika disampling belum tentu yang terjaring yang, menjadi penerima dari gerakan ini. Kemudian survei ini juga biasanya dilakukan Maret, padahal kita melakukan pendampingan maupun intervensi dari OPD langsung itu kegiatan belum terlaksana efektif, anggaran juga belum efektif. Belum lagi kalau ada kendala teknis di lapangan, misalnya anggaran sudah turun tapi belum dimanfaatkan oleh masyarakat penerima. Masih ada juga masalah data. Ketika sudah diintervensi tapi data tidak diubah, ya tidak ada hasilnya. Kalau ukuran keberhasilan ya kami sampaikan ada perbaikan data, ada perubahan status, dengan adanya kondisi ini bisa diketahui kondisi masing-masing desa seperti apa.

Kalau menurut versi kami ya kalau sudah diintervensi, aparat desa mau merubah data atau tidak. Jadi kita membuat panduan semudah mungkin terutama untuk OPD yang tidak terkait langsung. Makanya untuk mau memastikan mereka sudah merubah basis data atau belum, ini yang seharusnya ditanyakan di monev. Nah kalau di monev memang ditanyakan, dan kami punya datanyam tapi hanya di OPD yang terkait langsung. Nah yang tidak terlibat langsung itu kami tidak bisa mengendalikan, tidak bisa

memantau. Beda dengan 18 OPD yang langsung, karena mereka melaporkan harus dengan data balikan.

P : Apa kendala yang sering dihadapi oleh OPD dalam melaksanakan program ini di lapangan?

S : Kesulitan pasti ada. Tentu kesulitan karena resisten tadi. Kemudian yang juga menjadi kendala itu karena kesulitan tidak tahu caranya asesmen bagaimana. Itu yang mereka pertanyakan, karena mereka tidak terkait langsung. Sehari-hari tidak terjun ke lapangan.

P : Bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut agar program dapat berjalan lebih efektif?

S : Ya itu kita sampaikan setiap ada rapat-rapat dengan OPD yang tidak terkait langsung.

P : Apakah ada laporan atau indikasi mengenai sikap atau tindakan yang mungkin menunjukkan ketidakpuasan dari pegawai OPD dalam melaksanakan program? Jika iya, apa yang diketahui?

S : Itu sejak awal sudah ada pro dan kontra, kami paham. Ini kalau ngomong, tapi terpaksa ngomong ya kebijakan politik, tapi kok tidak enak mau ngomong. Ini sebenarnya arahan dari kepala daerah, semua melakukan. Walaupun pada waktu itu intinya kami sudah punya OPD langsung, tapi tetap sesuai arahan kepala daerah, semua harus. Terutama menumbuhkan semangat kontribusi dan menghidupkan juga kegiatan dengan CSR. Secara tidak langsung dengan kegiatan ini CSR kita hidup, selain Baznas dan UPZ. Semua harus ikut, kalau mungkin hanya bisa melakukan asesmen, tidak masalah, biar nanti yang menindaklanjuti OPD yang sesuai tupoksinya. Kita juga tidak menargetkan standar tertentu, karena kami paham bahwa OPD yang tidak terkait langsung akan berat fungsinya ketika dibandingkan dengan OPD yang terkait langsung. Di anggaran mereka saja tidak diizinkan melakukan intervensi di luar tupoksi. Makannya yang memungkinkan hanya kontribusi koordinasi. Untuk operasional, secara umum bisa menggunakan perjalanan dinas, tapi untuk kegiatan tidak bisa mengganggu jika tidak sesuai tupoksi. Misalnya Bappeda, tidak bisa melakukan anggaran terkait perencanaan untuk intervensi. BKD tidak bisa mengganggu dari kepegawaian untuk intervensi.

Awalannya memang ada resisten, tapi ketika sudah masuk lebih dalam, mereka enjoy. Awalnya memang resistennya bener, besar sekali. Kami tidak ada kaitannya langsung kok dilibatkan. Tapi itu kan memang arahannya pimpinan, kita bisa apa kan. Tapi dengan lama kelamaan, yang tadinya terpaksa, akhirnya tau kondisinya seperti apa dan kemudian bisa mengoordinasikan. Ya walaupun kita paham, sebenarnya ini bukan tupoksi mereka. Itu juga pertimbangannya tidak dipasang target tertentu. Kan tidak sesuai dengan tupoksi mereka, kalau dipasang target, ya mereka mau pakai uang dari mana. Kalau resistensi itu pasti dan di awal selalu ada.

Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ya tahu itu kalau ada resistensi, kan itu dikumpulkan langsung. Biro Kesra juga punya rekapannya. Tapi ya tetap dilaksanakan. Pak Gubernur kan orangnya kukuh. Kalau waktu itu

beliau menyampaikan agak tinggi nadanya, ya berarti beliau penekanannya ke OPD sudah sungguh-sungguh. Karena kemiskinan ini kan indikator makro, semua harus mau, walaupun itu tidak terkait langsung.

P : Bagaimana TKPK menanggapi kemungkinan adanya hambatan atau pengabaian dari birokrat yang terlibat dalam implementasi program?

S : Ya sebelumnya memang di awal penyusunan kebijakan, itu kita diskusi internal dulu. Bagaimana menghadapi OPD yang tidak langsung ini. Senjatanya kami pas renja itu. Setiap OPD itu dulu selalu mempertanyakan, ini kan tidak ada di kami, tidak ada kaitannya dengan tupoksi. Kami paham, dan kami sampaikan, tugasnya hanya membantu menemukan permasalahan lewat asesmen awal, laporkan dan sampaikan. Kemudian OPD mana yang sesuai, nanti akan disampaikan dan menambah volume pekerjaan OPD yang langsung. Kemudian kalau mau membantu langsung, bisa membantu mengontak dan mencari ke CSR.

Meskipun sudah kami sampaikan itu, ya pasti tetap ada, tetap iya ada yang menolak. Kalau awalnya tidak paham itu wajar. Kita berulang kali menyampaikan ke OPD yang tidak langsung ini. Sering salah beberapa kali, kemudian kita sampaikan lagi. Ya itu tugas kita untuk memahami itu dan berkali-kali. Karena itu resistennya juga tinggi, sangat tinggi. Kan prinsipnya, ini bukan OPD langsung, kenapa harus melakukan ini. Resisten ini ya wujudnya benar-benar tidak mau. Itu tahun 2019, benar-benar tidak mau. Ada yang tidak melaksanakan, tapi itu kan terekam datanya di Biro Kesra. Kemudian pengendalian ada di Pak Gubernur sendiri, ya otomatis Biro Kesra menyampaikan sendiri. Kemudian Pak Gubernur sendiri yang menegur langsung. Kalau hukuman sih tidak ada, tetapi lebih ke arah memahami pola pikirnya. Akhirnya ya mau jalan, sudah mulai tidak terpaksa. Karena setiap awal tahun, Pak Gubernur dan Pak Wagub mengumpulkan, mengarahkan di rapat besar.

Kalau covid itu tidak mempengaruhi resistensinya, tapi mempengaruhi program menjadi tidak maksimal. Karena semua fokus untuk penanganan covid. Kemudian di tahun 2023 itu sudah jalan semua, karena di Rakor besar itu sudah dipahami lagi. Asisten Kesra memimpin langsung untuk mengoordinasikan di Rakor.

P : Apakah ada arahan khusus terkait penyederhanaan prosedur pelaksanaan program? Bagaimana hal ini seharusnya dilakukan?

S : Ada OPD tidak langsung yang memang minta untuk disederhanakan lagi. Tapi kami tidak mau. Karena materi di dalam buku pedoman itu sebenarnya sudah bentuk penyederhanaan. Kalau disederhanakan lagi, intinya akan hilang. Jadi itu sudah kami sederhanakan karena kami memikirkan OPD yang tidak langsung tadi, tetapi tidak mengurangi esensi. Ada tadinya minta dirubah, harus begini-begini. Tapi jika dirubah nanti ada yang tidak terakomodir, ada yang tidak tercantum. Kami juga sempat berdebat lama dengan Biro Kesra ketika menyusun ini. Setelah jadi, ini juga masih diperiksa oleh tim ahli Pak Wakil Gubernur. Itu diteliti setiap kalimatnya sehingga memerlukan waktu lama. Kami harus menyesuaikan itu dengan yang diminta kepala daerah, karena banyak harus kita akomodir.

P : Menurut TKPK, apakah penyederhanaan prosedur pernah berdampak positif atau negatif terhadap pelaksanaan program?

S : Kalau dari OPD menyederhanakan sendiri ya saya kira ada. Contoh yang SKTM, seharusnya mereka kan melakukan intervensi sesuai dengan data DTKS. Tapi di lapangan ketika menemukan warga yang memang perlu untuk diintervensi, tapi ternyata tidak masuk ke dalam DTKS, ya ternyata mereka mempunyai cara dengan membuatkan SKTM. Ini sebenarnya bagus karena bisa memasukkan yang exclusion error, bisa menjadi data balikan juga. Itu yang kita tidak pikirkan sebelumnya, ternyata mereka menjembatani untuk bisa membantu. Jadi diskresi mereka menguntungkan dan kita tidak membatasi untuk diskresi seperti itu.

P : Apakah ada rekomendasi khusus untuk OPD atau pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberhasilan program di desa-desa dampingan?

S : Dari awalnya itu ya selalu, masukannya harusnya kita tidak usah ikut, tidak usah dilibatkan. Kan tidak sesuai dengan tupoksinya, tidak bisa mengganggu juga. Mereka juga menyampaikan, kami kan secara teknis tidak ke arah sana. Tapi kembali lagi, ini kan arahan Pak Gubernur seperti ini. Kami juga sampaikan kalau secara teknis melakukan itu malah salah. OPD yang tidak langsung itu salah kalau secara teknis melakukan intervensi. Ya sudah asesmen awalnya saja, matriksnya dipakai, laporkan, kemudian tindak lanjutnya di OPD yang langsung, yang secara teknis ke arah sana. Kalau dilihat dari tupoksi, OPD yang tidak langsung ini tidak akan masuk ke pengentasan kemiskinan. Kemudian dari OPD yang tidak langsung, mereka juga menyampaikan, dari buku panduan diminta untuk diperjelas dan dibuat lebih sederhana lagi. Padahal bahasa yang disitu sudah kami sesuaikan, sudah kami pikirkan untuk bisa menjembatani baik OPD yang langsung maupun OPD yang tidak langsung.

TRANSKRIP WAWANCARA
BIRO KESRA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Hari, Tanggal : Senin, 11 November 2024
Pewawancara : Ardaffa Firezha Wirandika
Informan : Eny Suryani, S.Pd., M.Dev.Plg
Jabatan Informan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Alamat : Jl. Pahlawan No.9 Semarang
Nomor HP : 082160954933
Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara
S = Sumber / Informan

P : Bagaimana tujuan utama dari Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah?

S : Tujuan utamanya untuk penanganan kemiskinan. Di Jawa Tengah ini ada 17 kabupaten merah, yang tingkat kemiskinannya di atas provinsi dan di atas nasional. Untuk menurunkan angka kemiskinan, kita ada program terobosan yang diinisiasi Pak Ganjar dan Pak Taj Yasin di tahun 2019. Program Maju Bareng untuk Penanganan Kemiskinan melalui Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan. Jadi tujuannya ya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

P : Apa yang menjadi latar belakang peluncuran program ini dan bagaimana program ini direncanakan untuk menjangkau desa-desa miskin ekstrem?

S : Itu tertuang di RPJMD kami, di Bab VI di strategi dan kebijakan, untuk percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di desa lokasi kantong-kantong kemiskinan melalui Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan. Kalau amanat RPJMD kan harus dilaksanakan oleh semua OPD.

P : Apa peran Biro Kesra dalam merancang dan mengawasi pelaksanaan program ini hingga di level desa dampingan?

S : Peran dari Biro Kesra sebagai leading sector atau koordinator pelaksanaan kegiatan desa dampingan yang dilakukan oleh 48 OPD di Jawa Tengah. Jadi mereka melaporkan kegiatannya setiap bulanan ke kami. Kita mengoordinasikan, mengadakan rakor-rakor untuk penentuan lokus yang harus dipilih oleh OPD, karena kami fokus di 923 desa merah di 17 kabupaten merah, atau kabupaten prioritas. Jadi untuk tahapannya itu pertama pemilihan lokasi desa dampingan. Itu kita mengumpulkan semua OPD yang dipimpin langsung Pak Gubernur dan Pak Wagub. Kita rutin mengadakan rapat evaluasi desa dampingan tahun sebelumnya dan rencana desa dampingan tahun berjalan. Jadi kita ya mengoordinasikan mulai dari perencanaan, sampai dengan pelaksanaan, dan pelaporan. Pelaksanaan dari OPD kan juga harus kita koordinasikan. Kami juga ada grup WA untuk desa dampingan yang melibatkan semua OPD.

P : Bagaimana Biro Kesra memastikan bahwa setiap OPD memahami dan menjalankan program ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?

S : Kami ada aplikasi Silap Online, Sistem Pelaporan Online Program Desa Dampungan. Disitu ada instrumennya, termasuk menu-menu laporan yang harus diisi oleh setiap OPD terkait dengan pelaksanaan program desa dampungan. Jadi setiap mereka melaksanakan kegiatan harus melaporkan. Untuk pemantauan, kita rutin melakukan rapat evaluasi triwulan yang dipimpin Asisten. Untuk teknisnya, walaupun ke Pak Gubernur, kalau sebelumnya ke Pak Wagub selaku Ketua TKPK, kemudian karena sekarang Pj. Gubernur, jadi yang melaksanakan Bu Asisten.

P : Menurut Biro Kesra, sejauh mana kesesuaian antara program ini dengan tupoksi masing-masing OPD berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi di lapangan?

S : Karena ini program terobosan, sebenarnya tidak linear dengan tupoksi. Contoh misalnya BKD, Inspektorat, masak mendampingi desa. Tapi karena ini program terobosan, istilahnya agar semua OPD memiliki kepedulian terhadap penanganan kemiskinan, sehingga mereka melalui berbagai upaya itu melaksanakan program desa dampungan. Mereka juga melaksanakan berdasarkan buku panduan yang telah kami sampaikan. Tujuannya agar semua OPD mempunyai pemahaman yang sama sesuai dengan koridornya untuk melaksanakan kegiatan desa dampungan sesuai buku panduan yang telah dibuat oleh tim dari Pemprov Jateng. Tim kecil itu terdiri dari Biro Kesra, Bappeda, Dinas Sosial, dan Dispermasdes.

Kalau yang linear seperti Dinas Sosial, sehari-harinya memang menangani kemiskinan. Tapi kalau di biro, inspektorat, BPSDM, BKD, itu kan tidak pernah melaksanakan kegiatan yang langsung penanganan kemiskinan ke desa. Makanya disusun buku panduan itu, sehingga semua OPD mempunyai pemahaman yang sama. Di tahun 2019, memang belum semua memahami, sehingga kita perlu sosialisasi buku panduan. Dulu mereka bingung, ini program mau seperti apa. Waktu itu sosialisasi panduannya disampaikan langsung oleh Pak Wagub. Kalau awal tahun, biasa kalau masih meraba-raba. Karena ini program Top Down ya harus mau. Ini amanat RPJMD ya harus dilaksanakan. Ya kalau keluhan di awal pasti ada, tapi kan tetap harus dilaksanakan. Itupun kan cuma omongan-omongan di warung kopi, di level teknis. Kalau di tingkatan kebijakan, di Eselon II, ya tidak ada yang berani. Namanya amanat RPJMD kan harus dilaksanakan, meskipun kebijakan itu banyak pro dan kontra, tapi tetap harus dilaksanakan. RPJMD kan menjadi landasan kita untuk pelaksanaan program dan kegiatan OPD selama 5 tahun. Jadi ya kalau omongan di bawa ya, ini bagaimana, ini kok seperti ini. Tapi ya kembali lagi, ini sudah menjadi kebijakan kepala daerah ya harus dilaksanakan. Walaupun tingkat bawahnya menolak, tapi itu sudah jadi kebijakan, ya mau tidak mau harus dilaksanakan.

Kemudian untuk anggaran, mereka yang tidak linear kan tidak ada yang langsung ke masyarakat, sehingga kita harus menggandeng CSR, Baznas, Perguruan Tinggi. Jadi khusus untuk OPD yang memang bukan tupoksinya

untuk penanganan kemiskinan, mereka harus berupaya keras untuk mengoptimalkan potensi anggaran non APBD. Karena terus terang anggarannya bukan untuk itu. Kalau pengaruhnya jelas lebih optimal yang OPD teknis. Mereka kan sudah ada alokasi anggaran.

P : Apakah ada upaya dari Biro Kesra untuk memastikan bahwa program ini selaras dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap OPD?

S : Kalau untuk intervensi kan memang anggaran harus lewat OPD teknis. Untuk memberikan bantuan kan harus sesuai tupoksi masing-masing. Misalnya kalau mau pengadaan jamban, pengalokasian APBD kan ada di Dinkes, RTLH tetap di Disperakim, tetapi nanti didistribusikan ke OPD lain. Kan tidak bisa kalau secara anggaran misalnya dialokasikan ke Biro Kesra, RTLH ke Biro Umum, tetap tidak bisa. Kalau untuk operasional memang dari OPD itu pernah mengajukan untuk bisa dianggarkan, tapi tidak disetujui karena ini kan program terobosan untuk mengoptimalkan anggaran yang ada dan terutama pembiayaan non APBD. Kalau membebaskan APBD ya sama saja.

P : Apa dampak yang diharapkan dari program ini terhadap masyarakat di desa miskin ekstrem di Jawa Tengah?

S : Dampak yang diharapkan ya menurunnya angka kemiskinan di Jawa Tengah. Tahun ini kita 10,57% angka kemiskinannya. Kita memang fluktuatif saat pandemi, tapi dari awal kita melaksanakan desa dampingan sampai dengan saat ini alhamdulillah kemiskinannya turun. Untuk saat ini kita sudah ada 320 desa dampingan yang sudah difasilitasi OPD Provinsi Jateng.

P : Apakah ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas program di desa-desa dampingan?

S : Kalau OPD itu wajib melaporkan kegiatannya setiap bulan. Tapi ada juga OPD yang mungkin tidak setiap bulan melaksanakan, jadi ya ditulis nihil saja. Ya itu karena keterbatasan anggaran, kemudian karena SDM tidak ada, kan lokusnya jauh dari kantor. Jadi kegiatan boleh tidak setiap bulan, tapi laporan tetap harus setiap bulan. Nanti kita laporkan ke pimpinan apa adanya, sesuai apa yang dilaporkan mereka. Kan kita melaporkan sampai ke Pak Gubernur.

P : Sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuannya di desa miskin ekstrem?

S : Kalau asesmen untuk menilai kegiatan OPD apakah sudah berdampak atau belum di desa ya kita menggunakan Silap Online itu. Jadi kita nilai sebelum intervensi dan setelah intervensi. Menilai angka kemiskinan kan tidak mudah. Tapi kami sederhana saja, sebelum dan sesudah. Kami tidak memberikan standar juga untuk masing-masing OPD. Jadi yang penting ada intervensi, kemudian ada perubahan dari sebelum intervensi dan setelah intervensi. Ketika ada perubahan berarti sudah berhasil. Jadi kita hanya bisa melihat *output* kegiatan yang sudah dilaksanakan.

P : Apa kendala yang sering dihadapi oleh OPD dalam melaksanakan program ini di lapangan?

S : Kendala kita waktu itu ya di tahun 2020-2022, kan ada Covid jadi ya kita beberapa bulan vacuum. Baru di akhir tahun kita bisa mulai berkegiatan lagi. Kalau sekarang karena sudah settle sudah tidak ada kendala. Kalau dulu di awal-awal banyak sekali yang masih nanya-nanya. Kalau sekarang paling cuma kalau ada pergantian personil. Kalau kendala di lapangan paling perangkat desa yang susah dihubungi, ada miss komunikasi. Kasus di BPKAD bahkan sampai pindah desa karena ada penolakan di desa. Desa merasa tidak miskin kok didampingi. Kemudian ya untuk menghindari konflik, kita pindah desa.

P : Bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut agar program dapat berjalan lebih efektif?

S : Ya dengan buku panduan tadi. Selain itu kita juga selalu mengadakan sosialisasi sebelum OPD terjun ke lapangan untuk pendampingan.

P : Apakah ada laporan atau indikasi mengenai sikap atau tindakan yang mungkin menunjukkan ketidakpuasan dari pegawai OPD dalam melaksanakan program? Jika iya, apa yang diketahui?

S : Kalau sekarang ya sudah lancar. Kalau awal ya pasti kesulitan, karena kan baru. Apalagi OPD yang tidak pernah terjun ke lapangan. Di awal memang mereka bingung, tapi setelah ada panduan, ada sosialisasi ya mereka mau tidak mau harus bisa melaksanakan.

P : Bagaimana Biro Kesra menanggapi kemungkinan adanya hambatan atau pengabaian dari birokrat yang terlibat dalam implementasi program?

S : Kalau program kita mengalir saja, ya tergantung dengan improvisasi masing-masing OPD. Sesuai arahan Pak Gubernur waktu ini, ini dianggap program ekstrakurikuler kepala OPD, untuk menguji kreativitas dan inovasi masing-masing OPD. Jadi masing-masing OPD diarahkan untuk berlomba-lomba. Kalau ada yang kurang proaktif, tidak ada penindakan, justru kita dampingi dan kita arahkan.

P : Apakah ada arahan khusus terkait penyederhanaan prosedur pelaksanaan program? Bagaimana hal ini seharusnya dilakukan?

S : Kalau di awal-awal itu memang rata-rata kegiatannya cuma fisik, RTLH dan jamban paling. Begitu selesai pembangunan, sudah. Kan yang penting aku sudah bantu. Pemberdayaannya masih kurang, pelatihan, permodalan, pendampingan itu masih kurang. Tapi ketika rapat evaluasi yang dipimpin langsung, lengkap Pak Ganjar dan Pak Yasin, beliau mengarahkan jamngan hanya fokus di pembangunan fisik, tetapi juga harus ada program-program pemberdayaan masyarakat. Khususnya yang 2 tahun terakhir ini, karena kebijakan pusat untuk penanganan kemiskinan ekstrem kita fokus di 8 intervensi PKE.

- P : **Apakah ada rekomendasi khusus untuk OPD atau pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberhasilan program di desa-desa dampingan?**
- S : Ya lebih diperbanyak lagi program-program untuk penanganan kemiskinan. Walaupun ada target penanganan kemiskinan 0% tapi kan tetap saja tidak bisa dihilangkan begitu saja. Paling bisa hanya mendekati 0%. Ini perlu sinergi lagi antara pusat, provinsi, kabupaten, sampai dengan desa.

TRANSKRIP WAWANCARA BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH

Hari, Tanggal : Senin, 11 November 2024
Pewawancara : Ardaffa Firezha Wirandika
Informan : 1. Titut Amalia
 2. Ameliasari Budiprahara, S.IP., M.Si.
Jabatan Informan : 1. Fungsional Perencana Muda
 2. Kepala Sub Bagian Program
Alamat : Jl. Pahlawan No. 127 - 133 Semarang
Nomor HP : 0815697550773 / 08170149022
Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara
 S = Sumber / Informan

P : Apa yang Anda ketahui tentang Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan? Apakah menurut Anda program ini penting untuk mengatasi kemiskinan ekstrem?

S : Jadi program ini merupakan inovasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Harapannya ada 48 desa yang dituntaskan setiap tahunnya. Kemudian intervensi ini dilihat dari 8 indikator. Tapi kemiskinan itu bukan sesuatu yang hasilnya bisa dilihat dalam 1 tahun. Kemudian juga tidak ada target khusus di masing-masing indikator itu.

Kalau di Bappeda yang pegang ada di Sub Bagian Program. Kemarin misalnya di Demak itu ada masalah gizi buruk, nanti intervensinya ada beras murah. Bappeda akan mengontak OPD lain untuk drop beras kesana. Jadi pentingnya ada OPD pendamping ini salah satunya untuk mempermudah masyarakat miskin mengakses yang menurut masyarakat itu sulit untuk mengaksesnya. Targetnya diharapkan bisa keluar dari kategori desa miskin. Cuman saya juga belum tahu apakah pernah ada evaluasi program ini yang menyandingkan pre dan post.

Kebijakan kemiskinan itu ada di Bappeda memang. Tapi untuk inovasi dan pengkoordinasian program desa dampingan itu ada di Biro Kesra. Kemudian untuk yang mendampingi desa miskin, diberikan tugasnya kepada masing-masing OPD. Kalau yang mencanangkan program ini langsung dari Pak Gubernur Ganjar. Kemudian direncanakan kebijakannya di Bappeda dan dikawal secara teknis di Biro Kesra.

P : Bagaimana Anda melihat peran Anda dalam mencapai tujuan program ini?

S : Bappeda karena OPD penunjang itu tidak punya spesifikasi khusus. Jadi tidak bisa seperti OPD yang memiliki bidang atau sektor khusus yang langsung bersinggungan dengan indikator kemiskinan tadi. Jadi kita lebih fokus pada update dan perbaikan data kemiskinan. Kemudian untuk yang sudah kita intervensi itu RTLH, jambanisasi, bantuan pelatihan. Inovasi kita kemudian mencari CSR yang bisa masuk kesana. Karena kalo kita di Bappeda tidak punya pos anggaran untuk kesana. Kita hanya bisa

menganggarkan untuk dukungan makan dan minum, kemudian untuk perjalanan dinas.

P : Bagaimana Anda melihat kesesuaian antara tupoksi Anda dan tujuan dari Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan?

S : Kalo PIC kami ada 2 orang, tapi untuk yang kesana kita bergantian. Jadi hampir setiap bulan kita ada kegiatan kesana. Kalau disesuaikan dengan tupoksi sebenarnya tidak ada kesesuaian khusus ya. Kalau di Bappeda kan terkait kemiskinan itu ada kebijakannya, di perencanaan dalam bentuk makro. Jadi tidak ada kekhususan untuk menangani ini. Ya ini tugas tambahan sih, tapi tupoksi utama tetap bisa jalan.

P : Apakah ada tanggung jawab tambahan yang Anda rasa harus diemban terkait program ini?

S : Iya kalau ini memang sebuah tugas tambahan.

P : Dalam situasi di mana tupoksi Anda tidak sejalan dengan tuntutan program, bagaimana Anda menghadapinya?

S : Ya kembali lagi, karena kita itu kan kebetulan di sekretariat. Memiliki kerja pendukung di bidang-bidang yang lebih spesifik. Kemudian mengetahui komitmen Pemprov Jateng dalam program desa dampingan, ya kita harus mengesampingkan ego di level sempit.

P : Bagaimana kesesuaian atau ketidaksesuaian tupoksi Anda memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan?

S : Nah ini misalnya terkait RTLH, kita kan terbatas di SDM dan alokasi anggaran. Jadi kita sangat bergantung pada bantuan. Beda dengan Disperakim, mereka punya anggaran terkait RTLH. Mereka bisa drop RTLH ke desa dampingannya lebih leluasa dengan tetap memperhatikan persyaratan. Setiap OPD pasti berbeda kecepatan dan kontribusinya. Karena selain tergantung pada kemampuan anggaran, juga terkait dengan keaktifan dan inisiatif OPD.

P : Bagaimana Anda menyesuaikan cara kerja Anda untuk memastikan bahwa tupoksi tetap terpenuhi sambil juga mendukung program ini?

S : Karena tidak intens terus menerus, jadi tidak ada penyesuaian yang sampai sangat berubah. Kemudian ketika sewaktu ke lokasi, jadi kami bergiliran saja dan tidak harus semua yang kesana. Ya kita lebih ke koordinasi setiap bulan, jadi ketika ada keperluan lain yang mendesak, yang terkait dengan tugas utama, pasti kita prioritaskan.

P : Apakah ada tugas atau kebijakan tertentu yang menurut Anda kurang relevan dengan kondisi di lapangan?

S : Kalau saya rasa 8 indikator itu sudah relevan untuk diterapkan.

P : Bagaimana Anda menentukan prioritas dalam tugas yang Anda jalankan?

S : Kalau untuk tahun ini kita tidak merasakan adanya kesulitan ya. Pertama karena pimpinan support. Kedua, desa itu kebetulan perangkatnya komunikatif dan responsif. Kemudian dari sisi unit kerja, itu kan tidak ada pendanaan khusus, tapi dari teman-teman juga support misalnya untuk penganggaran konsumsi. Jadi tahun ini kendalanya sedikit. Kalau di tahun-tahun awal, itu kita sudah jalan tapi belum jelas. Intervensinya ya sebatas kita, semampu kita sesuai dengan yang relevan dengan tupoksi kita. Kalau itu, yang penting kita bisa memberi bantuan ke desa dampingan. Belum paham terkait adanya 8 indikator yang harus diintervensi. Mulai agak terarah mungkin mulai 2020 dan seterusnya.

P : **Dalam beberapa situasi, apakah Anda menemukan cara untuk menyederhanakan prosedur dalam implementasi program? Apa yang mendorong Anda untuk melakukan hal tersebut?**

S : Kita yang kesulitan untuk menangani itu di indikator disabilitas. Kita baru bisa memberikan intervensi berupa bantuan paket sembako saja. Karena disabilitas itu kan beda-beda ya kondisinya, dokternya juga beda-beda. Itu yang belum bisa kita optimalkan disitu. Mereka juga rumahnya jauh-jauh, tidak di 1 titik. Jumlahnya juga cukup banyak ada 40 orang. Arahan dari atas kan sebenarnya lebih kompleks, padahal kita harus memetakan satu-satu dan tidak ada kemampuan untuk intervensi satu persatu. Jadi kita menyederhanakan sendiri saja. Memberi bantuan sekali itu paling apa sih efeknya. Kemudian kalau di indikator lain paling di stunting. Paling kita cuma bisa memberikan edukasi saja. Seharusnya kan idealnya ada pemantauan dan intervensi setiap bulannya. Bahkan arahnya intervensi itu sejak usia remaja, sejak calon ibu. Ya kalau seperti itu kan kita tidak mampu, jadi harus menyederhanakan sendiri sesuai kemampuan.

P : **Sejauh mana Anda merasa memiliki ruang untuk beradaptasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari? Apakah ada contoh di mana Anda harus membuat keputusan berdasarkan konteks lokal?**

S : Ada contoh misalnya kita menerima bantuan dari Baznas itu untuk jambanisasi per unit Rp2.500.000, ternyata itu tidak cukup. Kemudian tidak mungkin ini kita kembalikan lagi ke Baznas. Jadi sokusnya ya kita carikan pendanaan lain sebagai tambahan. Waktu itu dapat dari UPZ Bappeda. Ya kemudian kita memberi laporan kepada pimpinan dan bisa untuk ditambahkan dari anggaran tersebut. Kalau dari pemprov, terutama leading sektornya di Biro Kesra itu tidak pernah mempermasalahkan soal substansial, yang penting sudah ada upaya untuk membantu. Paling yang disinggung itu hanya ketepatan pelaporan setiap bulan. Jadi belum sampai ke substansi. Paling yang belum ada kegiatan sama sekali itu yang akan terdeteksi. Tidak ada tuntutan harus bagaimana.

P : **Apa tantangan utama yang Anda temui dalam menjalankan program ini? Apakah ada faktor tertentu yang membuat pelaksanaan program menjadi lebih sulit?**

S : Kalau kesulitan untuk koordinasi sih tidak. Tapi karena kita melibatkan pihak luar jadi harus menyesuaikan dengan timeline dan cara kerja mereka

yang kadang berbeda dengan kita. Kemudian juga pengalaman kami tahun lalu itu kurang kooperatifnya pemerintah desa.

P : Bagaimana Anda mencoba mengatasi tantangan tersebut dalam pekerjaan Anda sehari-hari?

S : Ya kita tetap harus menyesuaikan dengan mereka. Karena kita kan sangat mengandalkan bantuan-bantuan dari pihak lain itu untuk mendanai program. Kemudian untuk yang kurang kooperatif tadi ya kami harus mengeluarkan energi lebih untuk menjalankan program.

P : Bagaimana Anda menilai dampak tindakan sehari-hari Anda terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem ini?

S : Kalau kami hanya melihat di level *output* ya. Jadi tidak bisa melihat sampai ke pengentasan kemiskinan. Pasti ya bermanfaat, tapi tidak bisa melihat sampai ke menggeser kemiskinan ekstrem.

P : Apakah Anda mendapatkan umpan balik dari masyarakat mengenai program ini? Jika ada, bagaimana Anda menanggapi umpan balik tersebut?

S : Kebetulan yang disini kooperatif, jadi tidak ada tanggapan yang berarti.

P : Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program agar lebih efektif dalam membantu masyarakat?

S : Kalau sejauh ini sebenarnya harapan kami, bisa tahu hasilnya seperti apa. Harapannya ada semacam rapor, dari desa ini ada kenaikan seberapa. Itu yang sejauh ini belum ada karena memang belum ada monitoring atau penilaian keberhasilan desa dampingan.

TRANSKRIP WAWANCARA
BIRO HUKUM, SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Hari, Tanggal : Senin, 16 Desember 2024
Pewawancara : Ardaffa Firezha Wirandika
Informan : Sri Wahyuningsih
Jabatan Informan : Koordinator PPHD (Penegakan Produk Hukum Daerah)
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Nomor HP : 08122520705
Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara
S = Sumber / Informan

P : Apa yang Anda ketahui tentang Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan? Apakah menurut Anda program ini penting untuk mengatasi kemiskinan ekstrem?

S : Ya ini gerakan yang sifatnya saya bilang keroyokan ya, dengan melibatkan semua OPD untuk mendampingi desa-desa miskin ekstrem.

P : Bagaimana Anda melihat peran Anda dalam mencapai tujuan program ini?

S : Jadi kita kayak sebagai penyalur saja ya. Misalnya Baznas ada pelatihan, kita menyampaikan, tawarkan ke warga, tapi ya belum tentu warga bisa berangkat karena jaraknya jauh. Kami tidak punya program khusus, tidak punya anggaran khusus untuk diimplementasikan di desa dampingan.

P : Bagaimana Anda melihat kesesuaian antara tupoksi Anda dan tujuan dari Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan?

S : Memang kita ada tusi yang terkait yaitu bantuan hukum. Tapi bantuan hukum ini lewat LBH yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi anggaran kita ya tidak bisa dikeluarkan untuk program ini. Misalnya untuk RTLH, ya kita hanya bisa fasilitasi karena anggaran ada di Disperakim. Kita cuma bisa ngecek saja apakah sudah dibelanjakan apa belum. Tapi untuk tahun ini tidak ada alokasi dari Disperakim untuk desa dampingan kami.

P : Apakah ada tanggung jawab tambahan yang Anda rasa harus diemban terkait program ini?

S : Iya bisa dikatakan ini merupakan tugas tambahan. Tetapi ini pun karena sudah merupakan programnya Pemprov, ya kita selaku OPD ini merupakan tugas yang tetap harus dijalankan. Ya ini tugas, untuk mendampingi 17 kabupaten yang masuk kategori miskin ekstrem. Dari Kepala Biro itu menugaskan koordinator 3 untuk mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas di desa dampingan.

P : Dalam situasi di mana tupoksi Anda tidak sejalan dengan tuntutan program, bagaimana Anda menghadapinya?

S : Kalau bicara tusi, pasti harusnya ada tusi yang berkaitan dengan desa dampingan. Misalnya kita punya tusi bantuan hukum, sebenarnya bisa kita implementasikan di desa dampingan. Bantuan hukum kan bisa berupa

sosialisasi, tidak harus saat berperkara. Tapi ya jika disandingkan dengan kemiskinan ya kurang relevan mas untuk pengentasan kemiskinan. Ini kan juga sebenarnya sulit kalau hanya 1 tahun diminta untuk mengentaskan kemiskinan. Itu kan terlalu singkat, apalagi jika dengan keterbatasan yang ada. Ya sekali lagi karena ini bagian dari tugas dan kewajiban kita. Ini kan sudah jadi satu program, sudah arahan dari pimpinan. Jadi tidak ada alasan, tusi saya bukan di desa dampingan. Ya sudah kita terima ini sebagai tugas. Cuma memang kami belum merasa optimal, karena memang kami tidak punya anggaran khusus.

P : Bagaimana kesesuaian atau ketidaksesuaian tupoksi Anda memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan?

S : Kalau program ini pastinya bicara pengentasan kemiskinan, pasti berkaitan dengan sektor-sektor pengentasan kemiskinan. Artinya, bantuan kemiskinan tidak harus berupa dana. Tapi kalau mau diselaraskan dengan tusi kami ya hanya bantuan hukum yang bisa diberikan. Paling mungkin kita hanya bisa mengandalkan sinergi misalnya dari CSR. Akan tetapi pemberdayaan masyarakat yang diharapkan jika melihat dari tusi kami ya masih hanya sebatas edukasi saja.

P : Bagaimana Anda menyesuaikan cara kerja Anda untuk memastikan bahwa tupoksi tetap terpenuhi sambil juga mendukung program ini?

S : Masing-masing OPD itu tidak ada anggaran khusus di DPA untuk pendampingan desa. Jadi kita kesana istilahnya untuk mencari informasi, punya potensi apa saja, kondisi masyarakat seperti apa, kebutuhannya apa saja. Jadi tidak sehari-hari. Memang sebenarnya banyak yang diharapkan dari desa, tapi hal itu kan tidak mungkin Biro Hukum melakukan. Artinya paling tidak kita ada satu upaya, karena ini merupakan programnya Pemprov. Ya kita berusaha dengan sesuai kemampuan kami. Pak Kepala Biro ya juga memahami, kita baru bisa melakukan sebatas ini saja. Karena untuk tusi kita sendiri saja, dengan anggaran yang ada itu masih dirasa kurang, dioptimalkan apa yang ada. Ya karena desa dampingan ini adalah tugas ya kita laksanakan meskipun dengan keterbatasan. Jadi Pak Kepala Biro ya tidak menuntut harus sesuai, harus bisa ini, harus melaksanakan ini. Ya kenyataannya kita melaporkan yang sudah kita lakukan dan laporan kita diterima, meskipun bisa dibilang ya programnya seadanya. Yang penting ada yang dilakukan, apapun bentuknya. Karena tidak semudah yang dibayangkan.

P : Dalam praktiknya, apakah ada saat-saat di mana Anda merasa tidak sepenuhnya sejalan dengan beberapa tugas atau program yang ada? Jika ya, apa yang membuat Anda merasa demikian?

S : Jadi kita melaksanakan ini kadang saat melaksanakan tusi melakukan pemantauan evaluasi perda-perda kabupaten. Sekalian kesana, sekalian kita mampir ke desa dampingan kita. Ya kita tidak bisa hadir sewaktu-waktu di desa dampingan. Misalnya kita menugaskan pegawai sini kesana, belum tentu mereka sanggup kan. Jadi kita mensiasati dengan sekaligus pemantauan menjalankan tusi utama. Kalau di sekda kan sifatnya

koordinatif, administratif, bukan yang teknis. Jadi ya kita paling cuma bisa edukasi.

P : Apakah ada tugas atau kebijakan tertentu yang menurut Anda kurang relevan dengan kondisi di lapangan?

S : Kalau dari kepala desa memang butuhnya itu perbaikan jalan. Pastinya kita di Biro Hukum tidak bisa menangani. Kita tidak ada program khusus, karena tidak punya anggaran khusus pendampingan.

P : Bagaimana Anda menentukan prioritas dalam tugas yang Anda jalankan?

S : Kita memaknainya karena ini sudah merupakan programnya Pemprov, otomatis mau tidak mau harus tetap dilaksanakan oleh pimpinan OPD. Ya seperti kita di koordinator 3 ditugaskan oleh pimpinan untuk mengoordinir pelaksanaan. Jadi ya ini kita lakukan juga belum tentu setiap bulan.

P : Dalam beberapa situasi, apakah Anda menemukan cara untuk menyederhanakan prosedur dalam implementasi program? Apa yang mendorong Anda untuk melakukan hal tersebut?

S : Di Biro Kesra itu kan memang seharusnya kita melaporkan tiap bulan kegiatan apa yang dilaksanakan. Akan tetapi kan kita juga tidak bisa setiap bulan ada kegiatan. Semisal tidak ada kegiatan ya kita laporkan saja kalau kita sedang kegiatan sinergi, pengajuan ke mana. Karena misal kita minta ke OPD lain, itu juga belum tentu bisa mudah langsung mendapatkan. Kalau Biro jelas memiliki keterbatasan, berbeda dengan OPD teknis yang sudah pasti punya anggaran untuk diimplementasikan ke desa dampingannya. Kita ya bisanya mengoordinasikan, mensinergikan, itu pun juga tidak semudah langsung dipenuhi. Yang penting ada yang kita lakukan di desa dampingan.

P : Sejauh mana Anda merasa memiliki ruang untuk beradaptasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari? Apakah ada contoh di mana Anda harus membuat keputusan berdasarkan konteks lokal?

S : Ini juga dari atas juga tahu, jadi tidak bisa mereka menuntut kita harus seperti OPD teknis. Misalnya seperti expo, tiap OPD harus mengirimkan dari desa dampingannya masing-masing. Biro-biro ini kan tidak punya anggaran untuk itu. Ya akhirnya kita keluarnya seluruh Biro bergabung menjadi satu. Itupun belum tentu dari desa dampingan ada produk yang bisa dipamerkan di expo.

P : Apa tantangan utama yang Anda temui dalam menjalankan program ini? Apakah ada faktor tertentu yang membuat pelaksanaan program menjadi lebih sulit?

S : Keterbatasannya ya kita tidak punya anggaran. Tidak seperti OPD teknis yang punya anggaran. Jadi selama ini kita ya hanya mengandalkan kerja sama.

- P : **Bagaimana Anda mencoba mengatasi tantangan tersebut dalam pekerjaan Anda sehari-hari?**
- S : Ya kita Cuma bisa mensinergikan tadi. Itu pun juga tidak mudah, tidak langsung bisa dapat. Kadang juga antre, kadang tidak dapat jatah. Kalau OPD teknis yang punya anggaran, pasti bisa lebih efektif mengimplementasikan program ini.
- P : **Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program agar lebih efektif dalam membantu masyarakat?**
- S : Sebetulnya kita sudah banyak kontribusi ke desa dampingan, apapun bentuknya. Pastinya ada lah yang diwujudkan di desa tersebut. Meskipun kemudian tidak serta merta desa itu berubah. Masing-masing OPD memang diharapkan punya kontribusi untuk pengentasan kemiskinan.

TRANSKRIP WAWANCARA
BIRO PEMOTDAKER, SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Hari, Tanggal : Senin, 11 November 2024
Pewawancara : Ardaffa Firezha Wirandika
Informan : Ir. Betty Wulandari, MP.
Jabatan Informan : Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Kerja Sama
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Nomor HP : 08122935745
Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara
S = Sumber / Informan

P : Apa yang Anda ketahui tentang Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan? Apakah menurut Anda program ini penting untuk mengatasi kemiskinan ekstrem?

S : Menurut pendapat kami, kebijakan ini merupakan suatu terobosan yang sangat penting untuk bisa mengentaskan beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah yang miskin ekstrem. Ada sekitar 13 atau 14 kabupaten/kota yang mengalami kemiskinan ekstrem. Jadi gerakan ini sangat berpengaruh nyata, signifikan untuk Pemprov Jawa Tengah bisa mengentaskan kemiskinan.

P : Bagaimana Anda melihat peran Anda dalam mencapai tujuan program ini?

S : Biro Pemotdaker sebagai salah satu OPD di Pemprov Jateng, disini kami mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama, kemudian juga mengoordinasikan tugas perangkat daerah, kemudian juga pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah. Termasuk kebijakan Satu OPD Satu Desa Dampungan. Kemudian kita sebagai pereangkat sekretariat GWPP, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, juga pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Nah gerakan ini termasuk pelaksanaan fungsi lain, pimpinan memberikan tugas kepada kami di Biro Pemerintahan.

P : Bagaimana Anda melihat kesesuaian antara tupoksi Anda dan tujuan dari Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan?

S : Disini kami sesuai petunjuk dari pimpinan, Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan, ini sudah 3 tahun. Kita semua bergerak, 50 OPD ke 14 kabupaten/kota.

P : Apakah ada tanggung jawab tambahan yang Anda rasa harus diemban terkait program ini?

S : Disini dari Bapak Pimpinan kami, Pak Kepala Biro mengeluarkan SK Tim untuk gerakan itu. Ini di luar struktural, di luar tupoksi ya, tugas khusus tadi mas. Pelaksanaan ini merupakan komitmen bersama dalam upaya mendukung misi ketiga pembangunan Jawa Tengah dalam penanggulangan kemiskinan. Ini masing-masing OPD beda-beda, tergantung manajerialnya. Jadi kita bagi habis perannya, di sela-sela tugas. Jadi gini mas, misalnya

kita ada dinas luar ke Blora, mampir sekalian ke Grobogan, jadi anggarannya pakai anggaran kinerja sekalian. Misalnya saat pemantauan RTLH, saat pelatihan, atau membuka acara. Menurut kami tidak mengganggu, karena sudah di-SK-kan, ini kan juga amanah, artinya kami sudah menyampaikan ke tim Desa Dampingan bahwa kita ini melaksanakan tugas sebagai amanah, sehingga harus kita laksanakan dengan ketulusan hati.

P : Dalam situasi di mana tupoksi Anda tidak sejalan dengan tuntutan program, bagaimana Anda menghadapinya?

S : Ya misalnya kita kan dituntut untuk mencari sumber-sumber lewat CSR atau Baznas. Kita kan mengajukan atau minta lewat proposal-proposal itu. Ya kadang kalau membuat proposal itu kan teman-teman ada keterbatasan untuk membuat proposalnya, dan mengawal proposalnya, dan melaksanakan sampai di desa. Itu kan banyak keterbatasan dari kita.

P : Bagaimana kesesuaian atau ketidaksesuaian tupoksi Anda memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan?

S : Ya sebenarnya kalau dari segi SDM, disini ada 45 orang. Itu saja idealnya masih kurang untuk menjalankan tugas yang utama. Jadi ya satu orang bisa pegang banyak kerjaan, apa aja dipegang. Kadang sehari bisa ada rapat sampai 5 kali. Teman-teman tim sedikit, jadi lari sana, lari sini. Disini hampir setiap bulan padat terus mas. Saya baru tahun ini diminta menjadi Ketua Tim. Tahun depan saya sudah lah, sudah capek. Tapi teman-teman minta, udah ibu terus saja. Karena harus hubungi sana sini untuk mengurus program ini.

P : Bagaimana Anda menyesuaikan cara kerja Anda untuk memastikan bahwa tupoksi tetap terpenuhi sambil juga mendukung program ini?

S : Kan ada perencanaan dan pelaporan, baik untuk gerakan ini atau untuk kegiatan struktural di kantor. Artinya terkendali, meskipun desa dampingan ini banyak kerjanya, harus kesana kemari. Di awal sudah ada sosialisasi dari Biro Kesra untuk pelaksanaan desa dampingan, ya di sela-sela itu saya rapat, bagi tugas, menyusun SK. Pertama ya kita turun ke lapangan, juga di sela-sela pekerjaan mengidentifikasi ke desa.

P : Dalam praktiknya, apakah ada saat-saat di mana Anda merasa tidak sepenuhnya sejalan dengan beberapa tugas atau program yang ada? Jika ya, apa yang membuat Anda merasa demikian?

S : Ya ini sudah kebijakan dari pimpinan ya. Selain itu juga tidak ada tuntutan harus bagaimana-bagaimana.

P : Apakah ada tugas atau kebijakan tertentu yang menurut Anda kurang relevan dengan kondisi di lapangan?

S : Kita koordinasi dengan Pak Kades langsung, jadi tidak ada sih.

P : Bagaimana Anda menentukan prioritas dalam tugas yang Anda jalankan?

- S : Saya kira jelas, prioritas tugas utama kami. Nah ini penugasan khusus, tapi harus tetap terpantau dan terkendali. Prioritasnya tetap yang utama, baru di sela-selanya kita mengerjakan desa dampingan. Jadi kita mengerjakan tugas utama dulu, setelah yang utama selesai, baru mengerjakan desa dampingan. Mana yang longgar, itu yang turun ke lapangan.
- P : **Dalam beberapa situasi, apakah Anda menemukan cara untuk menyederhanakan prosedur dalam implementasi program? Apa yang mendorong Anda untuk melakukan hal tersebut?**
- S : Jadi hal-hal yang harus kita selesaikan itu ada banyak sebetulnya. Ada stunting, itu belum sempat kita intervensi. Macam-macam kok, yang baru bisa kita intervensi itu jambanisasi, RTLH, dan pelatihan. Di tahun-tahun sebelumnya juga tidak bisa mengintervensi semuanya. Tahun kemarin itu malah cuma pelatihan-pelatihan saja.
- P : **Sejauh mana Anda merasa memiliki ruang untuk beradaptasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari? Apakah ada contoh di mana Anda harus membuat keputusan berdasarkan konteks lokal?**
- S : Ya itu kan ada panduan ya mas, tapi realisasi di lapangan kan mungkin kurang sesuai. Semisal jambanisasi, itu kan ada OPD ada yang intervensi hanya yang closetnya saja, ada yang septic tank nya juga termasuk. Kalau pedoman pelaksanaan itu kan belum sampai ke teknis, narasi di panduan masih secara makro saja. Jadi ya standar pelaksanaan itu beda-beda, tergantung juknis dari dinas teknis yang mengerjakan.
- P : **Apa tantangan utama yang Anda temui dalam menjalankan program ini? Apakah ada faktor tertentu yang membuat pelaksanaan program menjadi lebih sulit?**
- S : Keterbatasan anggaran, karena ini tugas khusus, tugas tambahan. Idealnya ada anggaran tersendiri untuk ini. Tidak ada kode rekening khusus untuk desa dampingan. Kemudian yang menjadi tantangan juga dari segi waktu, terutama dalam mengidentifikasi. Contoh stunting, kami mengidentifikasi ada kasus stunting. Nah untuk bisa mencegah atau menangani stunting itu idealnya kita kolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Itu yang belum bisa sinkron, seluruh OPD kan punya desa dampingan, mereka sudah antre di Dinas Kesehatan. Sementara Dinas Kesehatan cuma menyediakan penyuluh, tapi untuk mendatangkan penyuluh dan fasilitas penyuluhannya itu yang kita belum bisa menyediakan karena tidak ada alokasi.
- P : **Bagaimana Anda mencoba mengatasi tantangan tersebut dalam pekerjaan Anda sehari-hari?**
- S : Ya kalau mau kesana ya dicarikan dari perjadin monev. Misalnya pemantauan ke Kabupaten Grobogan, nah nanti mampir di desa dampingan.
- P : **Bagaimana Anda menilai dampak tindakan sehari-hari Anda terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem ini?**

- S : Kita sudah memberikan pelatihan, mengajukan ke Dinas Perindag, Dinas Koperasi, dan Dinas Tenaga kerja. Kita juga memberikan 1 set peralatan untuk 25 ibu yang mengikuti pelatihan itu, supaya tidak berhenti saat itu juga. Kemudian kita juga intervensi memberikan 10 unit jambanisasi dari Perhutani. Jadi kita mengidentifikasi dulu, ternyata ada permasalahan-permasalahan. Kemudian kita sudah berhasil memberi intervensi RTLH sebanyak 12 unit dari Dinas Perakim di tahun 2024, kemudian ada 2 unit dari CSR BPR BKK Grobogan.
- P : **Apakah Anda mendapatkan umpan balik dari masyarakat mengenai program ini? Jika ada, bagaimana Anda menanggapi umpan balik tersebut?**
- S : Mereka sangat berterima kasih, malah minta lagi. Tapi kita kan juga terbatas ya. Malah mereka kadang minta bantuan uang, untuk modal, ya tidak bisa.
- P : **Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program agar lebih efektif dalam membantu masyarakat?**
- S : Kalau untuk desa dampingan ya menurut saya sudah pas.

TRANSKRIP WAWANCARA DINAS ESDM

Hari, Tanggal : Kamis, 5 Desember 2024
Pewawancara : Ardaffa Firezha Wirandika
Informan : Mashfufah, S.T.
Jabatan Informan : Kepala UPT Laboratorium Dinas ESDM Prov Jateng
Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 44 Kel. Tawangmas, Kec.
Semarang Barat.
Nomor HP : 08156549863
Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara
S = Sumber / Informan

P : Apa yang Anda ketahui tentang Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan? Apakah menurut Anda program ini penting untuk mengatasi kemiskinan ekstrem?

S : Program Desa Dampingan diluncurkan secara resmi oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 22 Juli 2019, berbarengan dengan acara High Level Gathering CSR untuk Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya masing-masing OPD agar dapat menjadi pendamping dan melakukan intervensi dari desa yang masih berstatus miskin (ekstrem). Program ini penting karena prinsip dasar dalam intervensi adalah kolaborasi, sinergitas lintas OPD dalam mengentaskan kemiskinan. Di Dinas ESDM kita mengerahkan seluruh cabang dinas, sejumlah 12 cabang dinas untuk mendampingi desa. Bahkan jika ada cabang dinas yang di wilayahnya tidak termasuk ke dalam prioritas kemiskinan ekstrem, tetap kita minta untuk mendampingi desa yang sesuai kriteria.

P : Bagaimana Anda melihat peran Anda dalam mencapai tujuan program ini?

S :

- Melakukan tinjauan langsung ke desa dampingan, berkoordinasi dengan aparatur, dan melakukan peninjauan untuk melihat potensi, permasalahan dan kondisi Masyarakat, memberikan ide dan saran untuk pemecahan masalah yang ada, serta melihat data (DTKS).
- Melakukan intervensi langsung sesuai dengan tupoksi, karena OPD yang mengampu dinas ESDM maka jika butuh bantuan sosial sambungan Listrik gratis, ikut mendata warga yang membutuhkan dan mengusulkannya dalam APBD tahun yang akan datang atau jika memungkinkan mengusulkan pada APBD perubahan. Juga dapat berupa bantuan sosial lainnya yang masih menjadi tupoksi dari DESDM.
- Melakukan koordinasi dengan OPD lain yang mempunyai program yang menjadi masalah di DD masalah kependudukan, koordinasi dengan dukcapil, Dinsos, bansos sesuai dengan kebutuhan, missal butuh RTLH, maka dikoordinasikan dengan OPD yang membidangi pemukiman, dan jika butuh sarana air bersih, maka berkoordinasi dengan PUBMCK.
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta/ Perusahaan stackholder Dinas ESDM yang masih memungkinkan ada dana CSR/ PPM yang

bisa dialokasikan dalam pelaksanaan intervensi bisa dalam bentuk beasiswa, penerimaan karyawan, bantuan modal usaha, pemasaran produk UMKM, dan bantuan alat supporting untuk UMKM, maupun kelompok Masyarakat (Tani ternak)

P : Bagaimana Anda melihat kesesuaian antara tupoksi Anda dan tujuan dari Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan?

S : Yang saya amati, dalam melakukan intervensi pengentasan kemiskinan di desa dampingan hampir setiap OPD mempunyai Tupoksi yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan tersebut bahkan ada yang menjadi urusan wajib. Dinas ESDM yang menangani masalah energi bisa intervensi pada penyediaan energi Listrik bagi keluarga tidak mampu dan tentu bekerjasama dengan PLN, di bidang energi baru terbarukan bisa memberikan bantuan seperti PLTS, Biogas dan lain sebagainya. Dan jika ada hal yang diluar kewenangannya, maka pengampu desa dampingan dapat berkoordinasi dengan OPD lainya baik ditingkat Kabupaten maupun sesama OPD Provinsi.

Kalau program ini di awal-awal memang semua OPD fokus di bidangnya masing-masing. Masing-masing sektor bergerak sendiri-sendiri. Misalnya Dinas Kesehatan, mereka hanya fokus ke kesehatan, karena kan ini tidak ada anggarannya.

P : Apakah ada tanggung jawab tambahan yang Anda rasa harus diemban terkait program ini?

S : Tentu ada, jika hal tersebut berhubungan dengan tupoksi, tanggungjawab tersebut sudah melekat pada tupoksi dan ini tidak masalah. Namun tanggungjawab tambahan saya mengartikannya apabila itu diluar tupoksi dan kita sudah melakukan tinjauan langsung ke Desa, dan melihat fakta sesungguhnya yang ditemui di desa, pasti akan menggerakkan hati untuk dapat membantu lebih, ini yang saya maksud tanggungjawab tambahan. Hal ini baik; dan bukan merupakan tanggungjawab yang memberatkan karena tujuannya menolong, maka jika menemukan hal semacam ini, kita dapat berkoordinasi lintas OPD atau bahkan dengan pihak swasta dan BUMN untuk membantu mencukupi kebutuhan di desa yang dianggap penting.

Kalau soal anggaran, kita memang tidak punya anggaran khusus. Tapi kita punya anggaran wasdal, pengawasan dan pengendalian. Kalau kita mau ke wilayah yang dekat dengan wilayah desa dampingan, sekalian dapat yang tupoksi pokoknya, sekalian mampir ke desa dampingan.

P : Dalam situasi di mana tupoksi Anda tidak sejalan dengan tuntutan program, bagaimana Anda menghadapinya?

S : Apapun tupoksi dari OPD, tentu goal besarnya kearah kesejahteraan masyarakat atau searah visi Provinsi. Itu harus menjadi prinsip terlebih dahulu, namun jika fakta lapangan sesuai tupoksi, memang tidak sejalan maka Langkah berikutnya koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan OPD lain baik di Tingkat Kabupaten maupun Provinsi yang mempunyai tupoksi yang sejalan, untuk turut membantu intervensi, atau kita bisa mengajak

BUMN/BUMD, swasta untuk turut membantu melalui program CSR/ PPM mereka.

Dulu ya ada pikiran, ada rasa, duh ini nanti anggarannya dari mana. Ini nanti programnya disana mau seperti apa. Karena dulu itu arahnya belum jelas. Kalau tugas tambahan itu biasa sih. Ya saya sebagai koordinator itu harus hati-hati, perbedaan sudut pandang itu pasti ada. Ya kadang saya di Grup WA itu tidak dibalas, dicuekin tapi ya biarin saja, mungkin sibuk. Nyatanya juga nanti dikerjakan semua. Kalau ada yang kurang satu dua ya nanti diingatkan.

P : Bagaimana kesesuaian atau ketidaksesuaian tupoksi Anda memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan?

S : Jika intervensi sesuai tupoksi tentu hal tersebut dipastikan bisa dilaksanakan, misalnya dalam pemberian bantuan Listrik gratis, biogas, PLTS. Namun jika tidak sesuai tupoksi kita akan mengajak OPD lain yang sesuai atau BUMD/BUMN untuk turut berpartisipasi. Namun dalam hal ini tentu OPD atau BUMD/ BUMN dan swasta sudah menentukan skala prioritas terhadap program masing-masing, maka hal ini belum tentu ajakan kita untuk intervensi dapat diterima.

P : Bagaimana Anda menyesuaikan cara kerja Anda untuk memastikan bahwa tupoksi tetap terpenuhi sambil juga mendukung program ini?

S : Yang pertama setelah kita mendapat tugas pendampingan, kita akan melakukan koordinasi ke Desa tersebut, dan menanyakan data (DTKS), maka prioritas pertama adalah yang berhubungan dengan tupoksi saya seperti keterdapatan keluarga yang belum mempunyai sambungan Listrik, potensi peternak sapi yang bisa diberi bantuan biogas, atau jika ada potensi PLTS. Jika ada maka itu yang diprioritaskan lebih dahulu, baru kemudian kita akan melihat dan mempelajari data terkait potensi UMKM, dan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat, masalah ini akan kami koordinasikan dengan OPD lain yg menanganinya.

P : Dalam praktiknya, apakah ada saat-saat di mana Anda merasa tidak sepenuhnya sejalan dengan beberapa tugas atau program yang ada? Jika ya, apa yang membuat Anda merasa demikian?

S : Dari pengalaman saya mengampu desa dampingan ada tupoksi yang sudah sejalan. Sehingga tidak ada masalah, jika ada tupoksi yang tidak sejalan maka selalu dikoordinasikan dengan OPD lain/ pihak swasta untuk turut intervensi, dan jika belum dapat berpartisipasi pun kita dapat memberikan penjelasan kepada pihak desa tentang hal-hal yang dapat dikerjakan oleh OPD pengampu.

P : Apakah ada tugas atau kebijakan tertentu yang menurut Anda kurang relevan dengan kondisi di lapangan?

S : Sejauh ini semua kebijakan sudah relevan dengan kondisi di lapangan.

P : Bagaimana Anda menentukan prioritas dalam tugas yang Anda jalankan?

- S : Hasil dari survey lapangan dibuat laporan, dan diberi saran Dimana yang sesuai dengan tupoksi dijadikan prioritas utama, sedangkan yang tidak sesuai tupoksi dijadikan prioritas kedua, karena penyelesaiannya membutuhkan pihak lain baik OPD maupun pihak swasta. Penentuan prioritas program juga dapat ditentukan sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat, misalnya stunting, gizi buruk, maka hal ini segera di intervensi.
- P : **Dalam beberapa situasi, apakah Anda menemukan cara untuk menyederhanakan prosedur dalam implementasi program? Apa yang mendorong Anda untuk melakukan hal tersebut?**
- S : Pola koordinasi dan konsultasi dengan OPD lain, BUMD/BUMN atau Swasta, setelah mendapatkan arahan dari pimpinan dari data yang telah kita laporkan. Yang paling mungkin apabila di OPD terhambat minimnya anggaran maka yang bisa ditembus adalah lewat CSR/ PPM dari Perusahaan swasta atau dengan pentasyarufan dana UPZ/baznas. Prinsipnya apa yang mungkin dicoba, dan yang memang sulit dilaporkan disertai dengan penjelasan berbagai tantangan dan hambatannya dan kedepan apabila dimungkinkan akan ditindaklanjuti pada tahun- tahun berikutnya.
- P : **Sejauh mana Anda merasa memiliki ruang untuk beradaptasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari? Apakah ada contoh di mana Anda harus membuat keputusan berdasarkan konteks lokal?**
- S : Untuk pertanyaan ini saya mengambil contoh kasus salah satu DD diantara 12 DD yang kami ampu pada tahun 2024. Tahun 2024 ini Cabang dinas ESDM Sewu Lawu mendampingi Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri yang merupakan salah satu desa PKE, dan pada saat pendataan masih ada data DTKS Masyarakat yang belum berlistrik dan hal utama adalah soal penyediaan air yang bersih dan hiegienis.
Selain itu ada potensi yang dimiliki Masyarakat misal ada kelompok peternak lebah madu, UMKM kuliner/ catering, Petani Jamur, dan tanahnya cukup subur untuk ditanami buah-buahan agar nilai tanah menjadi produktif.
Berawal dari data ini, dirapatkan seluruh tim pengampu di Cabdin ESDM Sewu Lawu kemudian diputuskan Langkah intervensi yang dapat dilakukan dan tentu hal ini dilaporkan ke pimpinan untuk mendapat dukungan dalam pelaksanaanya. Hal-hal tersebut terlaksana tentu karena ada ruang untuk beradaptasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, dan Keputusan tersebut berdasarkan konteks lokal
- P : **Apa tantangan utama yang Anda temui dalam menjalankan program ini? Apakah ada faktor tertentu yang membuat pelaksanaan program menjadi lebih sulit?**
- S : Adanya beberapa data dari Desa yang tidak sesuai kenyataan. Pihak aparat desa sulit dihubungi melalui telepon apabila ada hal-hal mendesak. Lokasi desa dampingan jauh. Karena keterbatasan SDM, hanya ada beberapa

aparatus desa yang dapat menindaklanjuti/merespon apabila ada permintaan data, *input* data dan permintaan untuk segera mengajukan proposal dll.

P : **Bagaimana Anda mencoba mengatasi tantangan tersebut dalam pekerjaan Anda sehari-hari?**

S : Apabila ada kesempatan mengunjungi lokasi. Membina hubungan dan selalu berkomunikasi dengan aparat yang mampu menindaklanjuti apabila ada permintaan data, *input* data, proposal dll.

P : **Bagaimana Anda menilai dampak tindakan sehari-hari Anda terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem ini?**

S : Dampaknya dapat membantu pengentasan kemiskinan, antara lain :
- RTLH, jambanisasi, bantuan listrik murah, bantuan sumur untuk air bersih, bantuan makanan bergizi untuk anak stunting dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan.
- Bantuan peralatan untuk UKM makanan, bantuan peralatan pasca panen/pipil jagung, bantuan pemasangan listrik untuk pasar, bantuan peralatan pembuatan air minum isi ulang, bantuan bibit ikan dan ayam untuk meningkatkan perekonomian.
- Pelatihan Industri bidang makanan dan pelatihan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berusaha.

P : **Apakah Anda mendapatkan umpan balik dari masyarakat mengenai program ini? Jika ada, bagaimana Anda menanggapi umpan balik tersebut?**

S : Ada (pelaku UKM melaporkan progress usahanya, KUBE penerima bantuan peralatan pembuatan air isi ulang telah memasarkan dan menawarkan produknya, desa dampingan yang support apabila kita libatkan dalam kegiatan lain misalnya mengikuti pameran)
Selalu menanggapi positif dan memberikan semangat agar mereka tetap berusaha dan mempertahankan yang telah dicapai.

P : **Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program agar lebih efektif dalam membantu masyarakat?**

S : Monitoring bantuan peralatan ataupun pelatihan yang telah diberikan. Bantuan jamban dan RTLH ditunjang dengan sosialisasi/kampanye PHBS

**TRANSKRIP WAWANCARA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA**

Hari, Tanggal : Senin, 16 Desember 2024
Pewawancara : Ardaffa Firezha Wirandika
Informan : Sandy Suharto Putro, S.Par., M.Si.
Jabatan Informan : Analis Objek Wisata
Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 12
Nomor HP : 082134864636
Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara
S = Sumber / Informan

P : Apa yang Anda ketahui tentang Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan? Apakah menurut Anda program ini penting untuk mengatasi kemiskinan ekstrem?

S : Jadi terkait dengan program desa dampingan merupakan kebijakan di Prov Jawa Tengah terkait dengan pengentasan desa dengan kemiskinan ekstrem atau desa di zona merah. Memang hingga tahun 2024 ini kita masih belum bisa zeor desa miskin ya. Makannya untuk mendongkrak itu, kita melakukan kebijakan 1 OPD 1 desa. Nah, apa yang bisa kita lakukan, nanti tergantung instansi yang menjadi pendampingnya itu. Kebijakan itu memang sudah lama ya, dan itu setiap tahun terus berganti desa dampingannya.

P : Bagaimana Anda melihat peran Anda dalam mencapai tujuan program ini?

S : Kalau Disporapar, kita pendampingannya dalam bentuk kewirausahaan pemuda. Kita menggandeng pemuda di desa itu untuk aktif dan produktif terkait dengan kewirausahaan dengan mengedepankan potensi yang ada di desa. Dengan olahraga kita juga melakukan pendampingan terkait dengan sarana prasarana olahraga. Kalau untuk pariwisata, bisa dalam hal pengembangan kompetensi pariwisata atau kita mendorong untuk melaksanakan event pariwisata yang berkelanjutan dan mendorong untuk menjadi desa wisata.

P : Bagaimana Anda melihat kesesuaian antara tupoksi Anda dan tujuan dari Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan?

S : Pendampingan yang kita lakukan itu yang sesuai dengan tupoksi kita. Jadi sesuai dengan renstra kita, hanya lokasinya digeser ke desa dampingan. Setiap OPD pasti beda-beda caranya, sesuai dengan bidang masing-masing. Kebetulan di kami ini ya terkait dengan pemuda, olahraga, dan pariwisata.

P : Apakah ada tanggung jawab tambahan yang Anda rasa harus diemban terkait program ini?

S : Sebenarnya bukan tugas tambahan ya mas. Kalau dari kita yang mengerjakan memang dari kita sendiri mas. Jadi leadingnya di sekretariat, kemudian sekretariat akan mengkompilasi program-program apa yang

sekiranya bisa dilaksanakan di desa dampingan. Jadi bukan tanggung jawab tambahan, tapi hanya mengubah lokus saja.

P : Dalam situasi di mana tupoksi Anda tidak sejalan dengan tuntutan program, bagaimana Anda menghadapinya?

S : Masih sejalan, karena kita hanya mengimplementasikan program yang kita punya itu di desa dampingan. Hanya menggeser lokusnya saja yang memang itu menjadi tugas utama kami.

P : Bagaimana kesesuaian atau ketidaksesuaian tupoksi Anda memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan?

S : Kalau untuk efektivitas kami akan dapat dilihat dari kesejahteraan yang meningkat. Kalau sebatas pelaksanaan kegiatan saja kan belum terlihat. Tergantung dari potensi apa yang mereka miliki untuk bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Secara efektivitas ya tidak bisa terlihat dalam 1 atau 2 tahun.

P : Bagaimana Anda menyesuaikan cara kerja Anda untuk memastikan bahwa tupoksi tetap terpenuhi sambil juga mendukung program ini?

S : Kita hanya menggeser saja, program yang sudah ada kita pindahkan lokusnya ke desa dampingan.

P : Bagaimana Anda menentukan prioritas dalam tugas yang Anda jalankan?

S : Karena kita tetap menjalankan tugas utama, hanya digeser saja, jadi prioritas tidak ada yang perlu penyesuaian.

P : Dalam beberapa situasi, apakah Anda menemukan cara untuk menyederhanakan prosedur dalam implementasi program? Apa yang mendorong Anda untuk melakukan hal tersebut?

S : Kalau untuk pemenuhan indikator, kita juga bekerja sama misalnya dengan dinas-dinas lain. Kita cek apakah desa dampingan kami menjadi daftar penerima bantuan, entah RTLH, jambanisasi, atau yang lainnya.

P : Sejauh mana Anda merasa memiliki ruang untuk beradaptasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari? Apakah ada contoh di mana Anda harus membuat keputusan berdasarkan konteks lokal?

S :

P : Apa tantangan utama yang Anda temui dalam menjalankan program ini? Apakah ada faktor tertentu yang membuat pelaksanaan program menjadi lebih sulit?

S : Ketika kita mengimplementasikan program sesuai rencana, tetapi pasca implementasi yang kita tidak tahu. Karena kondisi masyarakat itu kan berbeda. Misalnya kita sudah mendampingi desa wisata, bagaimana mengelolanya, bagaimana membuat paket wisata. Tapi kembali lagi ke masyarakat, apakah mau meneruskan atau tidak. Padahal kita sudah membuka peluang. Intinya kesulitan kami adalah apakah SDM disana siap

atau mau mengimplementasikan untuk jangka panjang. Karena tidak mungkin kita mendampingi desa jangka panjang, maksimal hanya 2 tahun.

P : Bagaimana Anda mencoba mengatasi tantangan tersebut dalam pekerjaan Anda sehari-hari?

S : Solusinya kita coba dengan menggandeng teman-teman desa ikut di kegiatan kami meskipun sudah bukan bagian dari desa dampingan kami. Meskipun sudah selesai menjadi desa dampingan kami, ada celah-celah yang bisa kita upayakan agar mereka tetap berlanjut. Misalnya untuk mencari pendanaan untuk desa wisata.

P : Bagaimana Anda menilai dampak tindakan sehari-hari Anda terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem ini?

S : Ya susah untuk melihat, karena kembali lagi melihat apakah masyarakat mau untuk menerapkan dan melanjutkan yang sudah diajarkan.

P : Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program agar lebih efektif dalam membantu masyarakat?

S : Harapan saya untuk desa-desa yang menjadi dampingan itu bisa dipetakan potensi apa yang bisa dikembangkan. Ketika sudah dipetakan nanti OPD akan disesuaikan dengan potensi apa yang bisa diintervensi sesuai dengan tupoksinya, sehingga tepat sasaran. Karena selama ini kita hanya disuruh memilih, tetapi tidak tahu disana ada apa. Setelah memilih kita baru menggali. Harapannya desa yang akan menjadi OPD sudah terpetakan potensinya sehingga ketika OPD mendampingi bisa lebih tematik dan terarah. Misal Desa A punya potensi pariwisata, kita masuk disitu. Atau misalnya desa B punya potensi UMKM, silakan Dinas Koperasi dan UMKM masuk kesitu, karena sesuai tupoksinya. Jadi harapan kami bisa lebih efektif dan efisien. Desa yang kami dampingi saat ini ada yang harus buka jalan, jadi harus memulai dari nol. Ya susah untuk mengembangkan, apalagi dalam waktu yang singkat.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DESA KEDUNGWADUK, KARANGMALANG, SRAGEN**

Hari, Tanggal : Senin, 4 November 2024
Pewawancara : Ardaffa Firezha Wirandika
Informan : Priyadi
Jabatan Informan : Kepala Desa Kedungwaduk
Alamat : Kedungwaduk RT 07 Kedungwaduk, Karangmalang, Sragen
Nomor HP : 081226305502
Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara
S = Sumber / Informan

P : Bagaimana Anda memahami Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan yang dilaksanakan di desa Anda? Apakah menurut Anda program ini penting untuk mengatasi kemiskinan ekstrem?

S : Dari kabupaten kita masuk ke dalam daftar Desa Tumis (Desa Tuntas Miskin). Kemarin dari provinsi, pada waktu Gubernur Pak Ganjar itu, Kedungwaduk termasuk kemiskinan ekstrem. Tapi ekstremnya dimana, apa yang membuat ekstrem itu saya tidak tahu. Yang jelas pada waktu itu ketika ditetapkan menjadi Desa Tumis, DTKS disini itu lebih dari 1500, tapi setelah direvisi sekarang menjadi 700 sekian. Kita tidak pernah meminta program apapun ke Provinsi, jadi provinsi itu turun setelah kita ditetapkan menjadi kemiskinan ekstrem ini.

P : Bagaimana Anda menilai peran OPD Pemprov Jateng dalam implementasi program ini? Apakah mereka terlihat berkomitmen?

S : Ya karena disini jaraknya jauh dari provinsi, jadi perannya cuma komunikasi lewat telfon. Kemarin koordinasi dengan carik saya terkait RTLH bantuan dari BAZNAS. Pernah datang kesini sekitar 2 kali. Memberikan sembako juga dari mereka. Ya karena jaraknya jauh ya cuma terlihat lewat komunikasi saja.

P : Apakah ada komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan pegawai OPD dalam pelaksanaan program?

S : Kalau kesini ya kita layani. Kemarin karena jauh jaraknya jadi komunikasi cuma lewat telfon. Paling mereka minta data, tapi programnya cuma 2 kali itu, RTLH sama pemberian bantuan sembako. Mereka kesini Cuma 2 kali itu.

P : Apakah Anda melihat pegawai OPD Pemprov Jateng melakukan simplifikasi dalam prosedur pelaksanaan program? Jika ya, bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas program?

S : Kalau pemberdayaan kurang begitu jalan mas. Jadi semua lebih banyak diambil alih dari kabupaten karena masuk Desa Tumis. Kalau dari pemprov malah tidak ada pemberdayaan.

- P : Bagaimana tanggapan Anda jika ada langkah-langkah dalam program yang diabaikan atau disederhanakan oleh OPD Pemprov Jateng?**
- S :** Kemarin itu ada, dari pemprov itu kan memberi bantuan RTLH untuk 3 orang dari BAZNAS, itu langsung diberikan kepada masyarakat, memberikan uang Rp 20 juta. Itu kan tidak lewat desa, langsung orangnya dipanggil ke Semarang diberi uang langsung. Awalnya memang kita mengajukan 10 atau berapa nama, kemudian yang disetujui 3. Kita juga malah jadi dikejar-kejar terus, ini sudah selesai dibangun apa belum rumahnya. Kecuali dana ditransfer ke desa, kita bisa memantau, bisa tanggungjawab. Uang langsung ke masyarakat tapi yang dioyak-oyak saya. Kemarin kebetulan warganya juga masalah itu, uang 20 juta tidak dibelanjakan semua, akhirnya yang ditegur saya. Saya uangnya tidak tahu kok yang ditegur saya.
- P : Apakah ada situasi di mana Anda merasa program ini tidak diimplementasikan secara maksimal oleh birokrat? Jika ada, bisa Anda jelaskan?**
- S :** OPD Jateng mungkin maunya juga ada perhatian, cuma perannya memang belum terlihat di masyarakat. Yang dilakukan kan hanya memberikan bantuan RTLH dari BAZNAS sama bantuan sembako tadi.
- P : Menurut Anda, apa saja kendala yang dihadapi oleh OPD Pemprov Jateng dalam melaksanakan program ini? Adakah hal-hal yang menghambat?**
- S :** Paling ya karena jarak itu, terlalu jauh mereka kesini.
- P : Apakah Anda sudah memberikan masukan atau kritik kepada OPD Pemprov Jateng terkait kendala-kendala tersebut?**
- S :** Kemarin kalau mau turun langsung, suruh koordinasi dulu dengan kabupaten. Jadi tidak bertumbukan programnya. Itu kan programnya sama, terkait pengentasan kemiskinan, tapi masih jalan sendiri-sendiri. Kemudian seperti yang RTLH, baiknya itu seperti program yang dari kabupaten. jadi ada verifikasi dulu, kalau sudah pantas, baru dikirimkan berupa material bangunan. Jadi kerja sama dengan toko material dan yang diterima tiap warga tidak sama, sesuai kebutuhan masing-masing. Itu sudah dihitung semua dari tim.
- P : Adakah saran yang ingin Anda berikan agar program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih berdampak bagi desa Anda?**
- S :** Pemprov kalau bisa suruh memperhatikan desa-desa yang ada. Paling tidak ada voucher untuk pembangunan desa. Biasanya itu kan voucher cuma dari partai, untuk membangun jalan, talud, untuk pembangunan desa. Tapi itu kan dari partai, sangat politis, yang diperhatikan hanya orang-orang dia. Jadi kemiskinan itu kan juga karena kurangnya pembangunan di desa. Harapannya ya pemprov bisa memperhatikan desa dengan memberikan voucher untuk pembangunan desa.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DESA TIBAYAN, JATINOM, KLATEN**

Hari, Tanggal : Selasa, 5 November 2024
Pewawancara : Ardaffa Firezha Wirandika
Informan : Suyati
Jabatan Informan : Kepala Desa Tibayan
Alamat : Bendorejo RT 06 RW 04, Tibayan, Jatinom, Klaten
Nomor HP : 0081215971213
Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara
S = Sumber / Informan

P : Bagaimana Anda memahami Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan yang dilaksanakan di desa Anda? Apakah menurut Anda program ini penting untuk mengatasi kemiskinan ekstrem?

S : Sebetulnya untuk pendampingan ini cukup bermanfaat untuk Desa Tibayan, karena untuk SDM disini memang agak rendah ya. Jadi masih memerlukan ilmu-ilmu yang masuk ke Desa Tibayan. Tahun lalu yang didapat dari Disporapar provinsi itu ada tentang kepemudaan, bantuan wifi 1 tahun, bantuan RTLH, bantuan jamban, bantuan stunting. Dari provinsi itu menurunkan 2 orang untuk menetap disini, menjadi pendamping.

P : Bagaimana Anda menilai peran OPD Pemprov Jateng dalam implementasi program ini? Apakah mereka terlihat berkomitmen?

S : Pegawai pemprov mendampingi Pokdarwis, menanyakan sudah punya apa saja, sudah merencanakan apa saja. Kemudian mereka memberi arahan seharusnya bagaimana. Kalau kerja sama dengan pihak swasta, saya kurang tahu pasti.

P : Apakah ada komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan pegawai OPD dalam pelaksanaan program?

S : Komunikasi baik mas, setiap ada info dari provinsi langsung disampaikan ke kita terutama lewat Ketua Karang Taruna. Tapi karena kesibukan ketua karang taruna yang bekerja jadi buruh pabrik, jadi sering terlewat dan tidak jadi mendapat bantuan.

P : Apakah Anda melihat pegawai OPD Pemprov Jateng melakukan simplifikasi dalam prosedur pelaksanaan program? Jika ya, bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas program?

S : Misalnya di program penanganan stunting, kita kan jumlahnya masih ada 43, setelah perbaikan-perbaikan data turun menjadi 17. Sekarang sudah turun menjadi 13. Tapi kurang tahu ya, apakah itu karena memang sudah usianya jadi lebih dari 5 tahun atau memang karena program. Programnya itu kan memberikan makanan tambahan selama 90 hari, itu dananya dari provinsi bekerja sama dengan BPD Jateng, tapi yang memasak dari ibu-ibu sini. Kalau 90 hari mungkin masih belum terasa ya efeknya, mungkin bisa lebih lama harusnya.

P : Bagaimana tanggapan Anda jika ada langkah-langkah dalam program yang diabaikan atau disederhanakan oleh OPD Pemprov Jateng?

S : Sebenarnya bukan diabaikan mas, karena keadaan Desa Tibayan saja. Jadi Desa Tibayan ini kan tujuannya untuk jadi desa wisata. Tapi ternyata syaratnya banyak untuk bisa mendapatkan bantuan dana desa wisata dari provinsi. Itu kita gagal terus. Salah satunya karena tanah masih zona hijau. Itu yang kita masih terkendala, ada lahan tapi belum ada sertifikat. Dari Disporapar itu ya hanya menyampaikan bahwa harus dipenuhi dulu. Jadi itu dari saya dan Pak Carik sendiri kemudian yang mengurus, tapi masih belum bisa karena perubahan baru bisa 5 tahun sekali. Ya karena itu jadi pendampingan provinsi ya belum banyak yang fokus ke desa wisata. Cuma meminta kita agar memenuhi syarat dulu.

P : Apakah Anda merasakan ada tindakan yang tampak kurang mendukung dari pegawai OPD Pemprov Jateng dalam pelaksanaan program ini? Misalnya, pengabaian atau kurangnya dukungan?

S : Ya mungkin karena jaraknya dari provinsi ke sini yang jauh, dan pendampingan bukan hanya Tibayan, jadi mungkin ya semampunya saja dari pendamping. Ya sesuai dengan dana yang ada saja.

P : Apakah ada situasi di mana Anda merasa program ini tidak diimplementasikan secara maksimal oleh birokrat? Jika ada, bisa Anda jelaskan?

S : Ya sesuai dengan dana saja mas. Dananya dari dinas kan sepertinya tidak banyak ya. Jadi ya banyak pendampingan-pendampingan yang sifatnya diskusi saja. Misalnya sebenarnya kita ada potensi peternak lembu, inginnya dikelola agar menjadi pupuk organik, tapi juga gagal saar uji coba. Baru mau pendampingan dengan kelompok tani, sudah habis waktu pendampingannya.

P : Menurut Anda, apa saja kendala yang dihadapi oleh OPD Pemprov Jateng dalam melaksanakan program ini? Adakah hal-hal yang menghambat?

S : Kalau kendala tidak ada.

P : Apakah Anda sudah memberikan masukan atau kritik kepada OPD Pemprov Jateng terkait kendala-kendala tersebut?

S : Desa Tibayan itu sebenarnya masih membutuhkan pendampingan. Tapi karena kemarin sudah mendapat pendampingan 2 tahun, infonya sudah tidak boleh lagi. Kemudian di RTLH, sebenarnya kemarin ada beberapa rumah yang masih kondisinya kurang, memang sudah bukan tanah tapi temboknya banyak yang rusak. Nah itu kemarin ternyata tidak masuk ke kategori rumah yang miskin ekstrem. Jadi dari pendamping itu menyampaikan yang penting data yang miskin ekstrem selesai dulu, sisanya nanti bisa dirembuk lagi. Jadi ya memang benar data RTLH yang

miskin ekstrem sudah habis, tapi sebenarnya masih banyak rumah yang layak untuk menerima RTLH.

- P : **Adakah saran yang ingin Anda berikan agar program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih berdampak bagi desa Anda?**
- S : Ya mudah-mudahan ada program lagi untuk Desa Tibayan. Tapi ya harapannya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan di desa. Kalau ada ya seperti bantuan ternak atau dibantu mengurus perizinan Desa Wisata. Kalau kemarin kan dari Disporapar cuma pelatihan, RTLH, bantuan jamban, stunting. Untuk pemuda kita kan juga harapannya bisa dibantu agar pemuda bisa dibantu mencari atau membuka pekerjaan. Kemarin kan baru diberi pelatihan saja, padahal juga memerlukan modal. Jadi setelah diberi pelatihan ya mandek, belum ada yang berhasil. Pernah ada pelatihan bengkel, batako, UMKM. Dikasih alat tapi masih kurang dan belum lengkap, jadi ya karena tidak ada modal lagi, tidak jalan. Kalau ada pelatihan harapannya ya ada alat dan ada modal.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DESA KRAJANBOGO, BONANG, DEMAK**

Hari, Tanggal : Selasa, 12 November 2024
Pewawancara : Ardaffa Firezha Wirandika
Informan : H.M. Sucipto, S.Pd.I.
Jabatan Informan : Sekretaris Desa Krajanbogo
Alamat : Desa Krajanbogo, RT 03 RW 03, Bonang, Demak
Nomor HP : 081225777003
Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara
S = Sumber / Informan

P : Bagaimana Anda memahami Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan yang dilaksanakan di desa Anda? Apakah menurut Anda program ini penting untuk mengatasi kemiskinan ekstrem?

S : Di tahun 2024 ini pendamping itu memberikan motivasi warga untuk usaha kecil termasuk memberikan arahan, misalnya untuk pembuatan piala, kerupuk, dan industri rumah tangga. Setahu saya ya hanya ke usaha kecil itu, pembinaan UMKM. Di tahun 2023, RTLH seingat saya juga ada itu.

P : Bagaimana Anda menilai peran OPD Pemprov Jateng dalam implementasi program ini? Apakah mereka terlihat berkomitmen?

S : Kalau dari ESDM ini sering ada bantuan mas, di tahun 2023. Kalau yang tahun 2024 ini yang mendampingi dari Dinas Kepemudaan ESDM itu banyak mas, ada bantuan gerobak untuk penjualan jus, ada bantuan stunting berupa susu dan paket makanan. Tapi kalau dari Dinas Kepemudaan itu cuma ke usaha kecil saja, memberikan arahan.

P : Apakah ada komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan pegawai OPD dalam pelaksanaan program?

S : Sering kesini. Kalau yang ESDM itu pegawainya langsung yang kesini. Tapi kalau dari Kepemudaan itu yang mendampingi rutin itu ada 2 orang mas-mas masih muda, tetapi beberapa kali juga ada staf yang datang sekitar 5 orang. Tapi kalau untuk kepala dinasnya, mohon maaf saya secara pribadi belum pernah ketemu disini.

P : Apakah Anda melihat pegawai OPD Pemprov Jateng melakukan simplifikasi dalam prosedur pelaksanaan program? Jika ya, bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas program?

S : Untuk pendampingan dari ESDM waktu itu kalau saya lihat ya sudah lumayan. Ya tidak bagus banget memang. Kalau penyuluhan-penyuluhan itu kan kalau warga diberi arahan ya sudah lewat begitu saja. Hanya sedikit yang bisa menindaklanjuti pengarahan-penngarahan itu. Kalau hanya mendampingi tanpa modal, tanpa pemasaran ya kurang efektif.

P : Bagaimana tanggapan Anda jika ada langkah-langkah dalam program yang diabaikan atau disederhanakan oleh OPD Pemprov Jateng?

S : Ya kalau di desa ini kan masalahnya itu ada di sarana prasarana yang masih kurang. SDM juga masih rendah pendidikannya. Sebagian besar paling hanya lulusan SD atau SMP paling banyak. SMA itu masih sedikit. Ya mohon maaf ya mas, kalau programnya pendampingan ini kan saya ketahui tidak didukung dana. Ya programnya ya seadanya saja begitu. Jadi kita ya tidak minta apa-apa, monggo lah kemampuan OPD seberapa.

P : Apakah Anda merasakan ada tindakan yang tampak kurang mendukung dari pegawai OPD Pemprov Jateng dalam pelaksanaan program ini? Misalnya, pengabaian atau kurangnya dukungan?

S : Ya kalau yang mendampingi saya pikir ya cukup lumayan baik lah. Kalau ESDM yang saya tahu sepertinya dari provinsi itu kan mendelegasikan ESDM Demak. Jadi mungkin yang dari Demak itu yang sering kemari. Ya sudah lumayan kalau melihat dari kemampuan OPD, kalau orang desa yang sekecil apapun kita sudah terima kasih.

P : Apakah ada situasi di mana Anda merasa program ini tidak diimplementasikan secara maksimal oleh birokrat? Jika ada, bisa Anda jelaskan?

S : Ya sebenarnya tiap dinas itu kan sudah dibagi-bagi ya, sudah punya tupoksi sendiri-sendiri. Ya mohon maaf kalau misal seperti kepemudaan kan ya bukan bidangnya. Jadi programnya ya masih meraba-raba. Tapi kalau sudah bidangnya, pasti ada dari kepala, bidang, seksi yang pasti sudah paham tentang kemiskinan.

P : Menurut Anda, apa saja kendala yang dihadapi oleh OPD Pemprov Jateng dalam melaksanakan program ini? Adakah hal-hal yang menghambat?

S : Kalau dari program ini sepertinya tidak ada. Tapi ya jujur saja, ada satu dua warga yang kadang merasa ingin juga mendapat bantuan. Kan tidak semua bisa mendapat.

P : Apakah Anda sudah memberikan masukan atau kritik kepada OPD Pemprov Jateng terkait kendala-kendala tersebut?

S : Kalau saya secara umum hanya membandingkan ESDM dan Kepemudaan ini agak berbeda. Lebih agak lumayan yang ESDM dibandingkan dengan Kepemudaan. Yang kepemudaan ini jarang terlihat, dan programnya juga saya rasa masih kurang. Kemarin itu hanya ikut di acara-acara olahraga 17 agustus.

P : Adakah saran yang ingin Anda berikan agar program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih berdampak bagi desa Anda?

S : Kalau harapan desa ya dengan kemampuan OPD bisa semaksimal mungkin ke warga kami yang SDM nya sangat rendah ini. Kalau orang kampung

yang diharapkan ya pasti materi. Ya kalau Krajanbogo harapannya ada pendampingan lagi, tapi dari dinas yang mungkin anggarannya lebih banyak. Jadi ya memang harusnya lebih konkret ke dinas yang memang khusus menangani kemiskinan. Karena kalau dengan khusus yang menangani itu pasti didukung dengan dana. OPD yang sudah-sudah ini kan juga repot kalau tidak ada dana. Kalau ada anggaran kan bisa lebih optimal programnya.

TRANSKRIP WAWANCARA DESA SIDOGEMAH, SAYUNG, DEMAK

Hari, Tanggal : Selasa, 12 November 2024
Pewawancara : Ardaffa Firezha Wirandika
Informan : Khanafi
Jabatan Informan : Kepala Desa Sidogemah
Alamat : Desa Sidogemah
Nomor HP : 082136816913
Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara
S = Sumber / Informan

P : Bagaimana Anda memahami Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan yang dilaksanakan di desa Anda? Apakah menurut Anda program ini penting untuk mengatasi kemiskinan ekstrem?

S : Yang dilaksanakan Bappeda di Desa Sidogemah sangat membantu. Salah satunya membantu warga yang terkena stunting. Dari Bappeda memang ada perhatian khusus, mulai dari makanan bergizi dan sanitasi. Di Sidogemah ada 3 status stunting dan 3 risiko stunting. Program ini sangat penting karena memang Sidogemah ini termasuk desa yang bersahabat dengan rob atau abrasi, sehingga harus ada perhatian khusus. Banyak potensi di desa ini, misalnya ada makam wali, ada GOR. Tetapi kita terkendala terutama karena akses jalan yang tenggelam karena rob.

P : Bagaimana Anda menilai peran OPD Pemprov Jateng dalam implementasi program ini? Apakah mereka terlihat berkomitmen?

S : Bappeda berusaha mengentaskan kemiskinan ekstrem, kedua desa wisata, terkahir kaitannya dengan kesehatan. Di bidang kesehatan itu terkait stunting dan mendampingi 5 posyandu disini, memberikan sarana berupa meja.

P : Apakah ada komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan pegawai OPD dalam pelaksanaan program?

S : Baik, sering koordinasi. Dalam satu tahun kalau tidak salah 4 kali ikut datang di musyawarah warga. Tapi kalau ada masalah, beliau juga sering kemari tapi tidak dalam acara formal. Kepala Bappeda kalau tidak salah 2 kali kemari, staf-stafnya seingat saya ada 6 orang.

P : Apakah Anda melihat pegawai OPD Pemprov Jateng melakukan simplifikasi dalam prosedur pelaksanaan program? Jika ya, bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas program?

S : Untuk pelaksanaan, alhamdulillah dilaksanakan semua. Ada bantuan listrik; RTLH 6 dari Disperakim, 4 dari Baznas, 1 dari UPZ; kemudian sanitasi juga ada beberapa. Akan tetapi waktu itu memang kita menyampaikan terkait infrastruktur, bisa lah Pak mohon dengan sangat untuk bisa dianggarkan dari provinsi atau bantuan keuangan provinsi, untuk 1 titik atau 2 titik. Tapi sampai sekarang memang belum ada kabar.

Trus kemarin misalnya, kita diajak ke Banjarnegara untuk mempromosikan UMKM. Rencananya itu kan mau bawa 4 orang peserta, ternyata tidak diperbolehkan. Hanya 2 orang saja pak, anggarannya tidak ada.

P : Bagaimana tanggapan Anda jika ada langkah-langkah dalam program yang diabaikan atau disederhanakan oleh OPD Pemprov Jateng?

S : Ya terkait dengan potensi dan masalah tadi, dari Bappeda kalau berusaha itu pasti karena memang menjadi desa dampingan. Akan tetapi dari Bappeda kan cuma bisa memberikan saran, tidak punya anggaran. Kalau menurut saya ya desa dampingan itu harusnya didampingi dan diberikan anggaran. Kalau disini kan kebutuhan di infrastruktur, tapi karena yang mendampingi dari Bappeda yang pasti tidak ada anggaran untuk kesana. Banyak arahan bahwa ini harus dijadikan Desa Wisata, tapi jika akses tidak diperbaiki yang tidak bisa.

P : Apakah Anda merasakan ada tindakan yang tampak kurang mendukung dari pegawai OPD Pemprov Jateng dalam pelaksanaan program ini? Misalnya, pengabaian atau kurangnya dukungan?

S : Kalau kaitannya dengan kesehatan, itu memang didukung penuh. Dari sarana prasarana, posyandu diberikan fasilitas meja dan kursi. Tapi kalau untuk infrastruktur dan fasilitas lain, itu memang tidak bisa berbuat apa-apa. Dari Bappeda kemarin kalau ditanya kaitannya dengan infrastruktur atau jalan, itu tanggapannya tidak terlalu semangat atau tidak serius. Karena mungkin tidak punya anggaran juga.

P : Apakah ada situasi di mana Anda merasa program ini tidak diimplementasikan secara maksimal oleh birokrat? Jika ada, bisa Anda jelaskan?

S : Waktu dari Bappeda untuk mendampingi Desa Sidogemah itu kan hanya satu tahun. Jadi ya hanya memaksimalkan waktu yang tersedia, misalnya dengan memberikan makanan bergizi untuk stunting, bantuan RTLH, dan bantuan jamban. Yang mungkin dirasa kurang maksimal ya belum ada solusi terkait kendala yang kita sampaikan di infrastruktur tadi. Kita sebenarnya bisa memunculkan pariwisata, kita bisa memunculkan GOR atau gelanggang itu bisa ramai. Tapi kalau akses tidak memadai, kita kan tidak bisa apa-apa.

P : Menurut Anda, apa saja kendala yang dihadapi oleh OPD Pemprov Jateng dalam melaksanakan program ini? Adakah hal-hal yang menghambat?

S : Kalau kendala secara langsung ya karena rob itu. Jadi ketika jalan tergenang rob itu tidak jadi ketika akan survei atau berkegiatan.

P : Apakah Anda sudah memberikan masukan atau kritik kepada OPD Pemprov Jateng terkait kendala-kendala tersebut?

S : Mendampingi desa-desa di sebelah utara Jalur Pantura, itu pasti yang diminta infrastruktur. Tanpa kita memperhatikan akses, perekonomian di

desa tidak akan maksimal. Jadi kalau ada anggaran ya tolong dipikirkan lagi untuk infrastruktur itu. Harusnya kita mikir stunting, kesehatan warga, atau pola pikir anak sekolah, kita tidak bisa karena setiap tahun harus memikirkan infrastruktur.

P : Adakah saran yang ingin Anda berikan agar program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih berdampak bagi desa Anda?

S : Perbanyak link atau jaringan. Karena misalnya ketika Bappeda kita sampaikan untuk meminta jalan atau infrastruktur, tanggapannya tidak begitu serius. Mungkin apakah tidak punya link atau tidak ada hubungan antardinas. Kalau kebutuhan itu banyak sebenarnya, tapi memang yang pokok itu ya infrastruktur jalan. Peninggian jalan itu hanya paling bertahan 3 tahun, setelah itu sudah tenggelam lagi. Tamu yang datang pasti kapok kalau akses tergenang rob. Itu juga jadi faktor kemiskinan disini, kita dimiskinkan oleh alam. Warga yang pendapatannya pas-pasan, uangnya habis untuk meninggikan rumahnya masing-masing. Kalau program pendampingan desa menurut saya bisa dilanjutkan, tapi didampingi oleh PU atau dinas mana, yang lebih sesuai dengan kebutuhan desa dan yang punya anggaran.

TRANSKRIP WAWANCARA DESA PRAMPELAN, SAYUNG, DEMAK

Hari, Tanggal : Selasa, 12 November 2024
Pewawancara : Ardaffa Firezha Wirandika
Informan : Muhammad Qoif
Jabatan Informan : Kepala Desa Prampelan
Alamat : Prampelan, Sayung, Demak
Nomor HP : 089604409868
Keterangan : P = Peneliti / Pewawancara
S = Sumber / Informan

P : Bagaimana Anda memahami Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan yang dilaksanakan di desa Anda? Apakah menurut Anda program ini penting untuk mengatasi kemiskinan ekstrem?

S : Yang sudah dilaksanakan di Desa Prampelan itu ada terkait kesehatan, RTLH itu ada 4 rumah, jamban ada 50. Itu di tahun 2023. Yang mendampingi dari Biro Hukum Setda. Kemarin ada CSR dari Semen Gresik untuk mengerjakan talud di Sungai Sanawang. Baznas juga membantu RTLH 2 buah. Ada juga bantuan sembako kesini. Penerimaanya yang menentukan dari sana, desa tidak mengusulkan. Jadi mungkin minta data dari dinsos atau mana kurang tahu.

P : Bagaimana Anda menilai peran OPD Pemprov Jateng dalam implementasi program ini? Apakah mereka terlihat berkomitmen?

S : Kemarin yang 2023 itu membantu mencarikan CSR itu untuk membantu permasalahan yang ada disini, yaitu banjir. Kita disini masalah utama adalah banjir karena curah hujan tinggi dan kiriman dari daerah lain. Prampelan ini kondisinya cekung mas, paling rendah dibandingkan daerah-daerah sekitarnya, jadi air mengalir kesini semua.

P : Apakah ada komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan pegawai OPD dalam pelaksanaan program?

S : Kadang dari pegawai Biro Hukum datang kesini melihat kondisi Desa Prampelan. Kalau satu tahun lebih dari 4 kali. Kadang juga kontak-kontakan dengan perangkat desa.

P : Apakah Anda melihat pegawai OPD Pemprov Jateng melakukan simplifikasi dalam prosedur pelaksanaan program? Jika ya, bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas program?

S : Kalau yang lebih efektif ya seharusnya yang bidangnya, dinas sosial atau yang lain. Jadi kan tahu persis bagaimana harus melaksanakan program. Terus yang terpenting ada sumber dananya. Biro Hukum kan tidak ada dana untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau di dinas lain kan mungkin ada khusus pengentasan kemiskinan. Ya desa memang butuh pendampingan untuk melaksanakan program positif di desa, karena kalau mengandalkan perangkat sendiri pasti kurang. Biro hukum kemarin itu cuma memberikan

bantuan RTLH, CSR dan sembako saja, belum ada prgram yang pemberdayaan masyarakat. Jadi ya masih jauh kalau untuk pengentasan kemiskinan.

P : Bagaimana tanggapan Anda jika ada langkah-langkah dalam program yang diabaikan atau disederhanakan oleh OPD Pemprov Jateng?

S : Kalau memang dari beliau-beliau menjalankan meskipun tidak sesuai dengan bidangnya, tapi kan bisa punya channel untuk mencari bantuan untuk daerah dampungannya. Jadi ya programnya juga seadanya, tergantung channel yang didapat bisa memberi bantuan apa saja.

P : Apakah Anda merasakan ada tindakan yang tampak kurang mendukung dari pegawai OPD Pemprov Jateng dalam pelaksanaan program ini? Misalnya, pengabaian atau kurangnya dukungan?

S : Mereka kalau mendampingi kesini juga baik, memberikan arahan-arahan. Ya alhamdulillah bisa terwujud meskipun hanya beberapa. Ya cuma awal-awal itu yang agak kurang karena saya juga masih kaget. Beliau-beliau ya menjalankan sesuai tugasnya.

P : Apakah ada situasi di mana Anda merasa program ini tidak diimplementasikan secara maksimal oleh birokrat? Jika ada, bisa Anda jelaskan?

S : Ya karena cuma 1 tahun ya kita ngikut saja sama program dari sana. Jadi kita belum sampai request mau minta apa. 1 tahun kan waktunya singkat, belum sering ngobrol juga soal apa yang kita butuhkan. Apalagi kalau untuk mengentaskan kemiskinan, masih jauh. Komunikasi saja masih belum intens.

P : Menurut Anda, apa saja kendala yang dihadapi oleh OPD Pemprov Jateng dalam melaksanakan program ini? Adakah hal-hal yang menghambat?

S : Kendalanya ya awal-awal kita dihubungi agak sulit. Karena awal-awal saya juga bingung, ini pendampingan dari Biro Hukum. Apa mungkin disini ada masalah. Jadi ketika awal dihubungi itu saya malas menanggapi. Analisa saya kalau Biro Hukum mendampingi itu kan kaitannya ada masalah hukum. Akhirnya trus tim sana menyampaikan kalau ini terkait kemiskinan ekstrem. Bingung dan kaget juga kok sewaktu awal-awal ada pendampingan Biro Hukum. Trus bingung juga kok dari OPD, Biro Hukum kok bisa larinya ke kemiskinan ekstrem. Apa itu sudah dari atasan ditunjuk kok disuruh ikut andil dalam pengentasan kemiskinan, kita kan tidak tahu. Eh larinya kok ke RTLH, ke CSR.

P : Apakah Anda sudah memberikan masukan atau kritik kepada OPD Pemprov Jateng terkait kendala-kendala tersebut?

S : Selama mendampingi desa ya terkendala waktu itu tadi, komunikasi Cuma lewat calling-calling saja. Sarannya ya Biro Hukum bukan tupoksi ke pengentasan kemiskinan, jadi untuk mencari bantuan ya kurang

maksimal. Karena beliau juga butuh dana, jadi ya hanya mengandalkan instansi yang pengentasan kemiskinan. Jadi masih kurang.

- P : **Adakah saran yang ingin Anda berikan agar program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih berdampak bagi desa Anda?**
- S : Kalau untuk mengentaskan kemiskinan ya baiknya dilanjut, komunikasi dengan desa terkait untuk kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa membantu. Harapannya juga bisa difokuskan saja sesuai dengan tupoksi yang memang berkaitan. Karena memang masih kurang untuk bisa lebih membantu kalau tidak sesuai bidangnya. Kalau dari Desa Prampelan yang alangkah baiknya ada pendampingan lebih di keterampilan. Sekarang anak-anak muda itu banyak yang tidak terampil, tidak mau kerja. Kalau ada program pemberdayaan masyarakat, pengembangan keterampilan, apalagi jaman sekarang. Itu yang kemarin belum sempat tersentuh sewaktu pendampingan.

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Provinsi Jawa Tengah**



**Wawancara dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah**



Wawancara dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah



Wawancara dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah



Wawancara dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah



Wawancara dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



Wawancara dengan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



Wawancara dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah



**Wawancara dengan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Jawa Tengah**



**Wawancara dengan Kepala Desa
Kedungwaduk, Karangmalang,
Sragen**



Wawancara dengan Kepala Desa Tibayan, Jatinom, Klaten



Wawancara dengan Sekretaris Desa Krajanbogo, Bonang, Demak



Wawancara dengan Kepala Desa Sidogemah, Sayung, Demak



Wawancara dengan Kepala Desa Prampelan, Sayung, Demak